



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) DAS ARAU KOTA PADANG**

**TESIS**



**INDRA SUHERMAN  
1021209104**

**PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCA SARJANA UNAND  
TAHUN 2013**

# PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) DAS ARAU KOTA PADANG

Oleh : Indra Suherman

(Dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Bujang Rusman, MS dan Dr. Ardinis Arbain)

## RINGKASAN

Selama  $\pm$  30 tahun pembangunan sektor kehutanan di Indonesia telah memberikan dampak positif dan negatif bagi pembangunan ekonomi daerah. Data menunjukkan laju deforestasi meningkat dari 1,6 – 1,8 juta ha/tahun pada tahun 1985 – 1997 menjadi 2,83 juta ha/tahun pada tahun 1998 – 2000, dan mengalami penurunan signifikan sebesar 1, 5 juta ha/tahun, kemudian sampai dengan tahun 2011 turun menjadi  $\pm$  1 juta ha/tahun (*Kementerian Kehutanan, 2011*). Kerusakan hutan dan lahan telah mencapai  $\pm$  43 juta hektar (*Kementerian Kehutanan, 2011*) yang tersebar baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dampak kerusakan akibat kondisi hutan yang terus mengalami degradasi tersebut ditunjukkan oleh kejadian-kejadian antara lain sering terjadinya bencana tanah longsor, banjir, polusi, kekeringan, perubahan iklim mikro.

Dampak kerusakan akibat kondisi hutan yang terus mengalami degradasi tersebut ditunjukkan oleh kejadian-kejadian antara lain sering terjadinya bencana tanah longsor, banjir, polusi, kekeringan, perubahan iklim mikro. Salah satu bentuk kerusakan tersebut adalah seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini pada DAS Kuranji dan DAS Arau yaitu adanya banjir bandang dan galodo pada tanggal 31 Juli 2012 yang menimpa masyarakat Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang yang banyak menimbulkan kerusakan dan kerugian pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, irigasi, dan kehutanan serta hancurnya sarana dan infrastruktur seperti pemukiman dan tempat tinggal masyarakat yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Kerusakan-kerusakan yang terjadi tersebut menunjukkan kerugian yang sangat besar dari

ekologi dan ekonomi sekaligus sangat mempengaruhi kondisi segala aspek kehidupan Kota Padang secara umum.

Salah satu bentuk program yang telah dilakukan untuk memulihkan kerusakan hutan dan degradasi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Menurut Karmellia (2009), yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu kegiatan karena adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting keberhasilan suatu pembangunan sebagai mana dinyatakan Ndraha (2010). Dengan demikian keterlibatan masyarakat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan adalah mutlak dilakukan. Untuk itu pendekatan partisipatif dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan yang ada di tingkat bawah menjadi prioritas dalam kegiatan ini.

Tujuan Penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang, kedua untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang. Penelitian Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2012 di Kecamatan Lubuk Kilangan, Pauh, Bungus Teluk Kabung dan Koto Tangah di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Variabel- variabel yang akan dipelajari dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Sebagai variabel bebas adalah faktor internal seperti persepsi, dan motivasi. Faktor eksternal penyuluhan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan. Sedangkan variabel tak bebas adalah partisipasi (Y) petani terhadap kegiatan reboisasi. Interaksi variabel-variabel ini akan dipelajari melalui data yang diperoleh di lapangan. Variabel yang telah ditetapkan tersebut di uraikan menjadi sub variabel, dan sub variabel diturunkan dalam bentuk indikator sebagai instrumen atau alat ukur dalam pengumpulan data primer di lapangan. Indikator yang digunakan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan

dan Lahan tanggal 3 April 2012. Metode analisis jalur digunakan untuk dapat mencari hubungan kausal atau pengaruh diantara variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang disimbolkan dengan Y. Sedangkan variabel independen yaitu faktor internal dan faktor eksternal disimbolkan dengan X yang terdiri dari 5 variabel yaitu motivasi (X1), persepsi (X2), penyuluhan (X3), lama tinggal (X4), dan tingkat pendapatan (X5).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan perhitungan komputerisasi didapat persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y = 0,043 + 0,476 (X1) + 0,332 (X2) + 0,065 (X3) + 0,0793 (X4) + 0,343 (X5) + \Sigma$$

Untuk mengetahui hubungan antara semua variabel bebas dengan variabel terikat, dapat dilihat dari koefisien korelasi (R) yang nilainya 0,923. Nilai R ini setara dengan 92,3 %, menunjukkan bahwa hubungan (*korelasi*) antara tingkat partisipasi dengan variabel bebas sangat kuat, karena koefisien mempunyai hubungan positif yang mendekati angka 1. Nilai koefisien determinasi X terhadap Y sebesar 0,887 atau 88,7 % . Karena variabel bebas lebih dari dua maka digunakan R Square yang nilainya 0,887 atau setara dengan 88,7 %, yang berarti sumbangan motivasi, persepsi, penyuluhan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah 88,7 % itu berarti 11,3 % ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar variabel motivasi, persepsi, penyuluhan, lama tinggal dan tingkat pendapatan (X1, X2, X3, X4 dan X5), yang mungkin dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabiliatsi Hutan dan Lahan (Y).

Analisis lebih lanjut dengan uji F di peroleh F hitung sebesar 48,249 dengan probabilitas 0,000. Bila F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan derajat bebas (5) (59) pada selang kepercayaan 95 % yang nilainya 2,371 dan  $H_0$  ditolak, maka  $F_{hit} >$

$F_{tab}$  yang menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh semua variabel bebas (motivasi, persepsi, penyuluhan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan) secara bersama-sama terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sangat nyata (*significant*). Hasil ini dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat partisipasi masyarakat dari faktor-faktor yang diteliti.

Kemudian dilakukan uji bagi masing-masing koefisien jalur dengan uji  $t$  – student untuk menguji keberartiannya dari hasil perhitungan SPSS untuk analisis jalur, koefisien yang digunakan adalah koefisien beta atau koefisien standar (*standardized coefficients*). Kriteria penolakan  $H_0$ , jika  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 : Hasil pengujian koefisien jalur  $t$  – student

No	Koefisien Jalur	$t$ hitung	$t$ tabel	Keterangan
1	0,521 (X1)	3.987	1,671	$H_0$ ditolak
2	0,256 (X2)	2.678	1,671	$H_0$ ditolak
3	0,069 (X3)	2.513	1,671	$H_0$ ditolak
4	0,073 (X4)	2.298	1,671	$H_0$ ditolak
5	0,277 (X5)	2.219	1,671	$H_0$ ditolak

Berdasarkan uraian hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL dipengaruhi oleh variabel motivasi, persepsi, penyuluhan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan sebesar 88,7 %, sedangkan sisanya adalah faktor-faktor lain yang tidak diteliti sebesar 11,3 %.

Faktor-faktor lain di luar variabel motivasi, persepsi, penyuluhan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan, dapat dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dari nara sumber yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, yang mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan RHL selalu berubah-

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 9 Juli 1960 sebagai anak pertama dari pasangan Suherman St. Maradjo dan Nurmi. Penulis telah menikah dengan Dr. Ir. Etti Swasti, MS pada tahun 1986 dan telah dikaruniai satu anak laki-laki (Muhammad Rizki Indraswari, 26 tahun) dan dua anak perempuan ( Nurul Myristica Indraswari, 24 tahun dan Nurul Rahma Indraswari, 23 tahun).

Pada tahun 1980 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur perintis II dan selama 1 tahun mengikuti kuliah TPB (Tingkat Persiapan Bersama). Pada tahun 1981 memilih Fakultas Kehutanan dan lulus pada tahun 1985. Tahun Ajaran 2010-2011 pada semester genap penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan ke program Master (S2) di Universitas Andalas pada program studi Ilmu Lingkungan dan lulus pada tahun 2013.

Penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dari tahun 1986 sampai sekarang.



## SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan yang ditulis dalam Tesis saya yang berjudul :

**“Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang”**

adalah merupakan gagasan atau hasil kerja/karya saya sendiri, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Padang, 8 Mei 2013

Yang membuat pernyataan

Indra Suherman  
1021209104

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

# PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) DAS ARAU KOTA PADANG

Oleh : Indra Suherman

(Dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Bujang Rusman, MS dan Dr. Ardinis Arbain)

## ABSTRAK

UNIVERSITAS ANDALAS

Latar belakang penelitian ini adalah Kerusakan hutan dan lahan telah mencapai  $\pm$  43 juta hektar (*Kementerian Kehutanan, 2011*) yang tersebar baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dampak kerusakan akibat kondisi hutan yang terus mengalami degradasi tersebut ditunjukkan oleh kejadian-kejadian antara lain sering terjadinya bencana tanah longsor, banjir, polusi, kekeringan, perubahan iklim mikro. Dampak kerusakan akibat kondisi hutan yang terus mengalami degradasi tersebut ditunjukkan oleh kejadian-kejadian antara lain sering terjadinya bencana tanah longsor, banjir, polusi, kekeringan, perubahan iklim mikro. Salah satu bentuk kerusakan tersebut adalah seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini pada DAS Kuranji dan DAS Arau yaitu adanya banjir bandang dan galodo pada tanggal 31 Juli 2012 yang menimpa masyarakat Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang yang banyak menimbulkan kerusakan dan kerugian pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, irigasi, dan kehutanan serta hancurnya sarana dan infrastruktur seperti pemukiman dan tempat tinggal masyarakat yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Kerusakan-kerusakan yang terjadi tersebut menunjukkan kerugian yang sangat besar dari ekologi dan ekonomi sekaligus sangat mempengaruhi kondisi segala aspek kehidupan Kota Padang secara umum.

Penelitian Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2012 di Kecamatan Lubuk Kilangan, Pauh, Bungus Teluk Kabung dan Koto Tangah di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Bertujuan, pertama untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang, kedua untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang. Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan dari 65 responden, faktor internal (motivasi, persepsi) dan faktor eksternal (penyuluhan, lama tinggal, tingkat pendapatan) berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan faktor eksternal, yaitu variabel penyuluhan besar pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pengaruh yang terbesar terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah faktor internal pada variabel motivasi sebesar 0,51 dan berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 95 % dimana nilai t hitung adalah  $3,987 > T_{tabel (59 ; 0,05)}$  adalah 1,671. Adanya pengaruh yang signifikan tersebut karena termotivasi adanya upah yang menarik dimana terdapat dua keuntungan dari upah yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan RHL yaitu jumlah yang diberikan cukup besar bila dibandingkan dengan upah sebagai buruh tani atau kuli bangunan dan diterima setiap akhir minggu.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, rehabilitasi hutan dan lahan, pulihnya daya dukung DAS dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah, Langit dan Bumi adalah ciptaan-Nya dan Titah-Nya telah berlaku pada-Nya, Ilmunya meliputi kerajaan-Nya, tidak satupun ada kecuali dengan Karunia-Nya, Wasyukurilah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **“Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang”**. Tesis ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Unand.

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan upaya penanggulangan kerusakan hutan yang dilaksanakan melalui kegiatan RHL yang pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah, kurang mengikuti sertakan masyarakat secara proporsional. Dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi dan hutan rakyat di harapkan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara nyata.

Tesis yang Penulis susun ini semoga dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan kajian dalam penyusunan kebijakan pembangunan kehutanan terutama dalam program perlindungan dan konservasi hutan. Dalam penulisan tesis ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif yang membangun terhadap selesainya tesis ini. Semoga tesis ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Padang, Mei 2013



## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Hipotesis .....	9
1.5. Kegunaan Penelitian .....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Partisipasi .....	11
2.1.1. Bentuk dan Jenis Partisipasi .....	15
2.1.2. Tingkat Partisipasi .....	17
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi .....	19
2.2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan .....	23
2.3. Reboisasi .....	29
2.4. Penelitian Terdahulu .....	32
2.5. Kerangka Pemikiran .....	34
III. METODE PENELITIAN .....	36
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
3.2. Bahan Penelitian .....	36

3.3. Metoda Penelitian .....	37
3.3.1. Disain Penelitian .....	37
3.3.2. Operasional Konsep/Variabel .....	37
3.3.3. Sumber Data dan Cara Penentuan Sampel Penelitian.	39
3.3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.3.5. Rancangan Analisis/Rancangan Uji Hipotesis .....	43
3.3.6. Lokasi Penelitian .....	46
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	47
4.1. Kondisi Biofisik DAS Arau .....	47
4.1.1. Luas dan Bentuk DAS .....	47
4.1.2. Topografi Wilayah .....	50
4.1.3. Iklim .....	50
4.1.4. Tanah .....	50
4.1.5. Penggunaan Lahan .....	51
4.1.6. Lokasi Penelitian .....	51
4.2. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Arau	54
4.3. Profil Responden Peserta Kegiatan RHL .....	57
4.4. Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan RHL .....	59
4.4.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan ....	59
4.4.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan ....	64
4.4.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pengawasan ....	68
4.5. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap	72
Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan	
dan Lahan (RHL) DAS Aarau Kota Padang .....	
4.5.1. Pengaruh Motivasi (X1) Terhadap	74
Partisipasi Masyarakat (Y) .....	
4.5.2. Pengaruh Persepsi (X2) Terhadap Partisipasi	77
Masyarakat (Y) .....	
4.5.3. Pengaruh Penyuluhan (X3) Terhadap Partisipasi	79
Masyarakat .....	
4.5.4. Pengaruh Lama Tinggal (X4) Terhadap Partisipasi	80
Masyarakat (Y) .....	

4.5.5. Pengaruh Tingkat Pendapatan (X5) Terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) .....	83
V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	91
5.1. Kesimpulan .....	91
5.2. Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	93
LAMPIRAN .....	94



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jenis Data Sekunder dan Sumber Data .....	42
Tabel 3.2. Skor dan Kriteria Penilaian Skalka Likert (Wulansari, 2003) .....	44
Tabel 3.3. Jadwal Penelitian .....	46
Tabel 4.1. Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah SWP DAS Arau .....	47
Tabel 4.2. Penggunaan Lahan di Kota Padang .....	52
Tabel 4.3. Luas dan Prosentase Lahan Kritis di Kota Padang .....	53
Tabel 4.4. Umur Responden Peserta Kegiatan RHL di Kota Padang .....	58
Tabel 4.5. Pendidikan Responden Peserta Kegiatan RHL di Kota Padang .....	58
Tabel 4.6. Pekerjaan Responden Peserta Kegiatan RHL di Kota Padang .....	59
Tabel 4.7. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan RHL Pada Tahap Perencanaan .....	61
Tabel 4.8. Keterlibatan Masyarakat Ungtuk Berpartisipasi Dalam Kegiatan RHL Pada Tahap Perencanaan .....	64
Tabel 4.9. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan RHL Pada Tahap Pelaksanaan.....	69
Tabel 4.10. Keterlibatan Masyarakat Ungtuk Berpartisipasi Dalam Kegiatan RHL Pada Tahap Perencanaan .....	74
Tabel 4.11. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan RHL Pada Tahap Pengawasan.....	74
Tabel 4.12. Keterlibatan Masyarakat Ungtuk Berpartisipasi Dalam Kegiatan RHL Pada Tahap Pengawasan .....	77
Tabel 4.13. Hasil Pengujian Koofisien Jalur t - student .....	79
Tabel 4.14. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Tinggal.....	81
Tabel 4.15. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang .....	34
Gambar 1.	Lokasi Lahan Kritis di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang .....	98
Gambar 2.	Salah Satu Lokasi Lahan Kritis di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang .....	98
Gambar 3.	Kegiatan Pengisian Media tanam ke dalam polybag oleh kelompok tani .....	99
Gambar 4.	Barisan polybag berisi media tanah yang siap untuk penanaman tanaman kehutanan .....	99
Gambar 5.	Perawatan bibit dari gulma dan rumput liar oleh kelompok tani .....	100
Gambar 6.	Jenis bibit kehutanan (mahoni) yang sudah untuk ditanam di lapangan.....	100
Gambar 7.	Jenis bibit MPTS (petai dan duriankehutanan (mahoni) yang sudah untuk ditanam di lapangan.....	101
Gambar 8.	Jenis bibit kehutanan (trambesi) yang sudah untuk ditanam di lapangan.....	101
Gambar 9.	Pelaksanaan pembersihan lokasi penanaman oleh kelompok tani pada program kegiatan RHL .....	102
Gambar 10.	Pelaksanaan pembersihan jalur tanaman oleh kelompok tani pada program kegiatan RHL .....	102
Gambar 11.	Pelaksanaan pengangkutan bibit ke lapangan oleh kelompok tani .....	103
Gambar 12.	Pelaksanaan pemberian pupuk pada tanaman oleh kelompok tani .....	103
Gambar 13.	Tanaman reboisasi hasil program kegiatan RHL oleh kelompok tani di Kecamatan Koto Tangah .....	104
Gambar 14.	Tanaman hutan rakyat hasil program kegiatan RHL oleh kelompok tani di Kecamatan Koto Pauh .....	104
Gambar 15.	Tanaman reboisasi hasil program kegiatan RHL oleh kelompok tani di Kecamatan Tlk Kabung .....	105
Gambar 16.	Tanaman hutan rakyat hasil program kegiatan RHL oleh kelompok tani di Kecamatan Pauh .....	105
Gambar 17.	Pengawasan oleh Tim Inspektorat terhadap program kegiatan RHL yang telah dilaksanakan	106

	oleh kelompok tani di Kecamatan Koto Tangah .....	
Gambar 18.	Pengawasan oleh Tim Inspektorat terhadap program kegiatan RHL yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani di Kecamatan Lbk Kilanngan ..	106
Gambar 19.	Pengawasan oleh Tim Inspektorat terhadap program kegiatan RHL yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani di Kecamatan Bunug Teluk Kabung .....	107
Gambar 20.	Pengawasan oleh Tim Inspektorat terhadap program kegiatan RHL yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani di Kecamatan Pauh.....	107



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peta lokasi penelitian .....	97
Lampiran 2 : Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan RHL .....	98
Lampiran 3 : Hasil Pengolahan Data SPSS.....	108
Lampiran 4 : Data responden peserta kegiatan RHL.....	113
Lampiran 5 : Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang ”.....	117
Lampiran 6 : Kuesioner untuk kelompok tani (responden) pada penelitian “ Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang ” .....	119



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hutan adalah sumber daya alam yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan Bangsa Indonesia, baik manfaat ekologis, sosial budaya maupun ekonomi. Selama  $\pm$  30 tahun pembangunan sektor kehutanan di Indonesia telah memberikan dampak positif dan negatif bagi pembangunan ekonomi daerah. Di sisi dampak positif, kehutanan telah memberikan sumbangan yang berarti bagi devisa negara sedangkan dampak negatifnya terutama aspek ekologi adalah semakin menurunnya potensi sumber daya hutan sehingga menimbulkan degradasi hutan dan lahan. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi dan potensi sumber daya hutan akhir-akhir ini semakin menurun. Data menunjukkan laju deforestasi meningkat dari 1,6 – 1,8 juta ha/tahun pada tahun 1985 – 1997 menjadi 2,83 juta ha/tahun pada tahun 1998 – 2000, dan mengalami penurunan signifikan sebesar 1, 5 juta ha/tahun, kemudian sampai dengan tahun 2011 turun menjadi  $\pm$  1 juta ha/tahun (*Kementerian Kehutanan, 2011*). Kerusakan hutan dan lahan telah mencapai  $\pm$  43 juta hektar (*Kementerian Kehutanan, 2011*) yang tersebar baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dampak kerusakan akibat kondisi hutan yang terus mengalami degradasi tersebut ditunjukkan oleh kejadian-kejadian antara lain sering terjadinya bencana tanah longsor, banjir, polusi, kekeringan, perubahan iklim mikro. Salah satu bentuk kerusakan tersebut adalah seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini

pada DAS Kuranji dan DAS Arau yaitu adanya banjir bandang dan galodo pada tanggal 31 Juli 2012 yang menimpa masyarakat Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang yang banyak menimbulkan kerusakan dan kerugian pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, irigasi, dan kehutanan serta hancurnya sarana dan infrastruktur seperti pemukiman dan tempat tinggal masyarakat yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Kerusakan-kerusakan yang terjadi tersebut menunjukkan kerugian yang sangat besar dari ekologi dan ekonomi sekaligus sangat mempengaruhi kondisi segala aspek kehidupan Kota Padang secara umum.

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki wilayah perkotaan di sepanjang pantai barat dibagian timurnya dilingkupi oleh pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke selatan. Dari punggung-punggung bukit yang berfungsi sebagai sebagai Kawasan Hutan Lindung di sebelah timur Kota Padang, mengalir tiga sungai besar yang membelah kota, merupakan sumber air utama Kota Padang, yaitu DAS Batang Arau, DAS Batang Kuranji, dan DAS Batang Air Dingin. Sumber daya air dari ketiga DAS tersebut telah dipergunakan untuk berbagai keperluan domestik, baik untuk rumah tangga, pertanian, industri ataupun kebutuhan lainnya. Dengan demikian kawasan hutan terutama Kawasan Hutan Lindung yang ada di bagian timur Kota Padang perlu dipertahankan fungsinya sebagai kawasan resapan air dan keberadaannya terhadap bahaya kerusakan, ancaman perambahan, dan illegal logging. Disamping itu perlu juga usaha pemeliharaan sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan hutan yang kritis baik dalam maupun luar kawasan. Ancaman dan masalah dalam pelaksanaan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Arau adalah alih fungsi lahan, penebangan liar, dan kebakaran hutan, akibatnya terjadi degradasi kawasan hutan lindung di DAS Arau

Kota Padang memiliki luas wilayah  $\pm 69.496$  Hektar berdasarkan pada peta land use-nya mempunyai Kawasan Hutan Konservasi ( 52 % ) diantaranya seluas  $\pm 36.505$  Hektar terdiri dari : Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas  $\pm 23.655$  Ha, Hutan Lindung (HL) seluas  $\pm 12.605$  Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas  $\pm 245$  Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas  $32.990$  Ha (48 %), diantaranya berupa infrastruktur jalan, pemukiman, persawahan, kebun dan lain-lain, dan terdapat lahan agak kritis  $\pm 24.446$  Hektar. Dengan luas kawasan hutan sebesar 52 % dari wilayah Kota Padang, maka peranan kawasan hutan konservasi terhadap lingkungan sangat besar karena hutan berperan mengatur tata air dan melindungi permukaan tanah dari erosi yang disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi serta tempat bermukimnya berbagai jenis flora dan fauna dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan.

Menurut Sitanala Arsyad (2010) bahwa penetapan DAS Prioritas di dasarkan atas kriteria berikut :

- a. Daerah yang hidro-orologi kritis, ditandai oleh besarnya angka perbandingan antara debit maksimum dan debit minimum serta kandungan lumpur yang berlebihan.
- b. Daerah yang telah, sedang, atau akan dibangun bangunan vital dengan investasi besar antara lain waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya.
- c. Daerah yang rawan terhadap banjir dan kekeringan.

- d. Daerah perladangan berpindah dan atau daerah dengan penggarapan tanah yang merusak tanah dan lingkungan.
- e. Daerah yang menyatakan tingkat kesadaran masyarakat terhadap usaha konservasi tanah masih rendah.
- f. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Berdasarkan kriteria tersebut dan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai maka DAS Arau merupakan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya, salah satunya bentuk pemulihannya adalah bagaimana meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau instansi terkait dalam pengelolaan DAS Arau dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Salah satu bentuk program yang telah dilakukan untuk memulihkan kerusakan hutan dan degradasi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka pengelolaan daerah aliran sungai dimana pelaksanaan kegiatannya berdasarkan letak kawasan yaitu didalam kawasan disebut dengan reboisasi dan di luar kawasan disebut dengan penghijauan atau hutan rakyat. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranan hutan sebagai ekosistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah suatu gerakan yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Menurut Karmellia (2009), yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu kegiatan karena adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting keberhasilan suatu pembangunan sebagai mana dinyatakan Ndraha (2010). Dengan demikian keterlibatan masyarakat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan adalah mutlak dilakukan. Untuk itu pendekatan partisipatif dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan yang ada di tingkat bawah menjadi prioritas dalam kegiatan ini.

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan kehutanan. Melihat kasus kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang selama ini dilakukan telah meyakinkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan merupakan salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan pembangunan kehutanan.

Beberapa contoh kasus yang menunjukkan keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan karena partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi seperti diungkapkan oleh Karmellia (2009), beberapa faktor kunci keberhasilan di Korea Selatan dalam melakukan rehabilitasi dan restorasi hutan seluas ± 3,225 juta hektar adalah :

- a) partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi,
- b) kebijakan dan komitmen nasional yang kuat,
- c) implementasi tahapan pembangunan kehutanan jangka panjang secara konsisten,

d) penerapan rekomendasi riset dalam kegiatan kehutanan.

Menurut Karmellia (2009), program rehabilitasi yang dilakukan pemerintah Vietnam telah berhasil merehabilitasi lahan seluas 450.000 hektar dengan partisipasi masyarakat, namun demikian mereka mengatakan bahwa keikutsertaan sektor swasta perlu lebih ditingkatkan untuk menjamin pendanaan yang lebih mapan. Di banyak negara Amerika Latin, inisiatif kelompok akar rumput merupakan kunci keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan. Menurut Silvio Brienza dan Everaldo Almeida dari Brazil serta Abel Meza dari Peru *dalam* Karmellia (2009), petani kecil secara aktif turut terlibat dalam upaya rehabilitasi. Upaya mereka ini dapat ditingkatkan dengan melakukan penguatan organisasi petani lokal dan dengan menawarkan teknologi tepat guna kepada masyarakat sesuai dengan situasi dan kapasitas setempat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka usaha-usaha rehabilitasi lahan telah diupayakan sejak tahun 1960-an melalui pendekatan sektor pertanian (Proyek Dep. Tan No. 001, 002 dst) walaupun penanganannya bersifat lokal dan menyeluruh yang didasarkan pada Perencanaan Reaktif dan Berdasarkan Kejadian Banjir dan Kekeringan. Selanjutnya tahun 1976/1977 dicanangkan program INPRES Penghijauan dan Reboisasi yang menunjukkan kepedulian Pemerintah terhadap fungsi lingkungan yang terus terganggu antara lain untuk menangani dan mengakomodasi upaya penanggulangan Lahan Kritis melalui Program Penyelamatan Tanah dan Air (PHTA) serta program Rehabilitasi Lahan Kritis (RLK). Selanjutnya Pemerintah mencanangkan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL atau GERHAN) pada tahun 2003, yang direncanakan secara

berkelanjutan sampai dengan tahun 2007 dengan sasaran 3 juta hektar lahan kritis. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian system pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai (Kementerian Kehutanan, 2010). Rehabilitasi mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan ketika system perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degradasi fungsi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplementasikan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sistem rehabilitasi hutan dan lahan dicirikan oleh komponen sebagai berikut : komponen obyek rehabilitasi hutan dan lahan, komponen teknologi, dan komponen institusi.

Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi sangat penting peranannya dalam mendukung keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan terutama pada kegiatan reboisasi dan penghijauan yang sedang dilaksanakan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Rehabilitasi hutan dan lahan pada hakekatnya merupakan gerakan moral dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya dan melibatkan banyak sektor secara terpadu dan terkoordinasi, sehingga partisipasi masyarakat sangat berperan dalam mencapai keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka reboisasi dan hutan rakyat yang merupakan salah satu upaya rehabilitasi hutan dan lahan telah dilaksanakan di Kota Padang, dimana kegiatannya dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat dalam bentuk kelompok tani. Dari awal kegiatan, masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang difasilitasi oleh

aparatus kehutanan seperti tenaga penyuluh yang bertugas pada masing-masing kelurahan. Kegiatan dilaksanakan pada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Lubuk Kilangan, Pauh, Bungus Teluk Kabung, dan Koto Tangah. Namun dari hasil evaluasi (Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang, 2005) ternyata tingkat keberhasilan masih rendah. Rendahnya keberhasilan ini dapat disebabkan oleh rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan seperti masyarakat tidak dilibatkan secara transparan dalam pelaksanaannya, masih tinggi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan karena menganggap kepemilikan atau sumberdaya hutan sebagai hak adat (hak ulayat) untuk memanfaatkannya sebagai mata pencaharian sehingga setiap ada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan masyarakat bersikap kurang peduli, pemilihan jenis bibit tidak sesuai dengan keinginan masyarakat setempat (Ardi dalam Kusworo, 2005), pembentukan organisasi dalam bentuk kelompok tani mendadak sehingga kelompok tani tidak tumbuh dan berkembang dengan baik dan begitu juga dengan sosialisasi kegiatan juga bersifat mendadak (Kementerian Kehutanan, 2010)

Dengan demikian, diperlukan upaya dan perbaikan sistem rehabilitasi hutan dan lahan dalam mengatasi kurang berhasilnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini dalam bentuk pemberdayaan masyarakat secara penuh berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dipengaruhi faktor yang ada dalam diri masyarakat untuk terlibat kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dan faktor yang ada diluar diri masyarakat untuk terlibat

dalam kegiatan reboisasi yang ditimbulkan oleh berbagai sumber yaitu lingkungan (Pujo, 2009).

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang diidentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian “ Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang “ ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang.
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang.

### 1.4. Hipotesis

1. Tingkat partisipasi masyarakat pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang masih rendah.
2. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program rehabilitasi hutan dan lahan DAS Arau Kota Padang, yaitu : motivasi, persepsi, penyuluhan, tingkat pendapatan, dan lama tinggal.

### 1.5. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sehingga keberadaan kawasan hutan pada DAS Arau Kota Padang tetap lestari.
2. Sebagai upaya dalam mendapatkan solusi terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sehingga keberadaan kawasan hutan pada DAS Arau Kota Padang tetap lestari.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Partisipasi

Pembangunan adalah proses partisipasi, dan harus dipahami sebagai proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan berbagai aspek dalam masyarakat (Roges, 2008 dalam Trison, 2010). Secara sederhana partisipasi biasanya diartikan sebagai peranserta seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan, yang bila dikaitkan dengan pembangunan maka yang dimaksud adalah peranserta dalam pembangunan. Tinjauan secara luas, partisipasi dipandang sebagai suatu proses yang dinamis, dan berdimensi jamak. Partisipasi dalam pembangunan berarti peranserta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dalam masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Anwar, 2008).

Partisipasi merupakan bentuk perilaku. Adapun factor yang dapat mendukung berperilaku, yaitu : (1) ada unsur yang mendukung untuk berperilaku tertentu itu pada diri seseorang, dan (2) terdapat iklim atau lingkungan yang memungkinkan terjadinya perilaku tertentu itu. Kedua faktor ini saling mempengaruhi dan saling berinteraksi, dimana faktor diri seseorang antara lain bakat, minat, kemauan, perasaan, fantasi dan tanggapan yang dibawa sejak lahir, sedangkan faktor yang berada di luar individu, misalnya pendidikan, lingkungan sosial dan status sosial.

Stephens (2009) serta Cohen dan Uphoff (2008) dalam Trison (2010) membedakan tahap partisipasi dalam proses pembangunan atas : (1) partisipasi pada tahap perencanaan, (2) partisipasi pada tahap pelaksanaan, (3) partisipasi pada tahap pemanfaatan, dan (4) partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan. Wardjoyo (1992) menyebutkan bahwa partisipasi dilakukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Menurut Ndharma (2008), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilahkan sebagai berikut : (1). Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai titik awal perubahan sosial, (2). Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya, (3). Partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan, (4). Partisipasi dalam pelaksanaan operasional, (5). partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, dan (6). Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Paling tidak ada tiga alasan utama pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan yaitu : (1). Sebagai langkah awal mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan suatu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan, (2). Sebagai alat untuk

memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap, dan (3). Masyarakat mempunyai hak untuk urun rembuk dalam menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah mereka (Suharjo, 2009).

Terwujudnya kegiatan partisipasi dalam proses pembangunan dapat disebabkan oleh adanya paksaan/sanksi, ajakan atau pihak lain ataupun kesadaran sendiri (Kementerian Dalam Negeri, 2010). Kesadaran berpartisipasi dipengaruhi oleh tingkat pemahaman atas objek partisipasi (program pembangunan). Oleh sebab itu masyarakat perlu diberi peringatan dan pemahaman tentang objek partisipasi termasuk cara aktivitas partisipasi itu dilaksanakan (Kementerian Dalam Negeri, 2010).

Beberapa contoh kasus yang menunjukkan keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan karena partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi seperti diungkapkan oleh Karmellia (2009), beberapa faktor kunci keberhasilan di Korea Selatan dalam melakukan rehabilitasi dan restorasi hutan seluas  $\pm$  3,225 juta hektar adalah :

- a) partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi,
- b) kebijakan dan komitmen nasional yang kuat,
- c) implementasi tahapan pembangunan kehutanan jangka panjang secara konsisten,
- d) penerapan rekomendasi riset dalam kegiatan kehutanan.

Menurut CIFOR (2004), program rehabilitasi yang dilakukan pemerintah Vietnam telah berhasil merehabilitasi lahan seluas 450.000 hektar dengan partisipasi masyarakat, namun demikian mereka mengatakan bahwa keikutsertaan

sektor swasta perlu lebih ditingkatkan untuk menjamin pendanaan yang lebih mapan. Di banyak negara Amerika Latin, inisiatif kelompok akar rumput merupakan kunci keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan. Menurut Silvio Brienza dan Everaldo Almeida dari Brazil serta Abel Meza dari Peru *dalam* CIFOR (2004), petani kecil secara aktif turut terlibat dalam upaya rehabilitasi. Upaya mereka ini dapat ditingkatkan dengan melakukan penguatan organisasi petani lokal dan dengan menawarkan teknologi tepat guna kepada masyarakat sesuai dengan situasi dan kapasitas setempat.

Di Thailand suatu yayasan berhasil mengembangkan program rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Seluas 512 Ha hutan rakyat telah ditanam oleh masyarakat setempat dan dikelola sebagai hutan masyarakat. Upaya ini dapat dicapai melalui suatu proses pengembangan pendekatan yang bertahap selama 13 tahun, dimulai dari kegiatan di beberapa desa menjadi lebih dari 30 desa (Muhammad Rizal, 2005).

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu keadaan nyata apabila terpenuhi adanya tiga factor utama yang mendukungnya yaitu : (1). Kemauan, (2). Kemampuan, dan (3). Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet, 2007). Keberadaan, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan akan dipengaruhi oleh berbagai factor diseperti kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, terutama factor-factor : psikologis individu, terpaan informasi, pendidikan, keterampilan, kondisi permodalan yang dimiliki, teknologi, kelembagaan,

kepemimpinan, struktur, dan stratifikasi sosial, budaya lokal, serta pengaturan dan pelayanan pemerintah.

Kemauan berpartisipasi bersumber pada faktor psikologis individu yang menyangkut emosi dan perasaan yang melekat pada diri manusia. Faktor-faktor yang menyangkut emosi dan perasaan ini sangat kompleks sifatnya, sulit diamati dan diketahui dengan pasti, dan tidak mudah dikomunikasikan, akan tetapi selalu ada pada setiap individu dan merupakan penggerak perilaku manusia. Menurut Slamet (2007) pengalaman empiris menunjukkan walaupun telah terbuka kesempatan-kesempatan untuk berpartisipasi, masyarakat tidak akan dengan sendirinya dapat memanfaatkan kesempatan itu. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan, ketidakmampuan atau karena masyarakat tidak memiliki keterampilan tertentu.

Manurut Hadi (2009), adanya partisipasi masyarakat akan membawa pengaruh positif, mereka akan bisa memahami dan mengerti berbagai masalah yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Dalam pencapaian sasaran tersebut maka elemen partisipasi masyarakat yang harus di penuhi adalah adanya komunikasi dua arah yang terus menerus dan informasi berkenaan dengan proyek, program atau kebijaksanaan disampaikan dengan bermacam-macam teknik yang tidak hanya pasif dan formal tetapi juga aktif dan informal.

### **2.1.1. Bentuk dan Jenis Partisipasi**

Partisipasi merupakan kata yang memiliki pengertian beragam yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan paling sering digunakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terutama dalam konteks kegiatan pembangunan (Awang *dalam* Kusworo, 2005). Dilihat dari bentuknya menurut Cohen *dalam* Kusworo, 2005

partisipasi dapat dibedakan menjadi : (1). Partisipasi pada tahap pembuatan keputusan, (2). Partisipasi pada tahap implementasi, (3). Partisipasi pada tahap evaluasi dan (4). Partisipasi untuk memperoleh manfaat dari suatu kegiatan.

Kartasmita dalam Kusworo (2005) membagi bentuk partisipasi menjadi 5 jenis meliputi (1). Partisipasi buah pikiran, (2). Partisipasi keahlian, (3). Partisipasi jasa-jasa, (4). Partisipasi uang, dan (5). Partisipasi sosial.

Prinsip-prinsip partisipasi yang dikemukakan oleh (Amstein dalam Kusworo, 2005) berupa :

1. Partisipasi utuh (*full participation*), yaitu suatu proses pengambilan keputusan dimana melibatkan semua pihak yang terkena program, termasuk didalamnya adalah kaum perempuan, remaja dan kelompok masyarakat lain yang sering terabaikan.
2. Partisipasi saling pengertian (*mutual understanding*), yaitu kesempatan untuk melakukan kegiatan yang harus bersifat awet dimana para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan perlu menerima secara terbuka pikiran-pikiran, cita-cita dan harapan yang berkembang dalam proses pengambilan keputusan.
3. Partisipasi yang didasarkan pada kesimpulan yang benar dan bijaksana (*inclusive solution*), yaitu suatu proses integrasi dari berbagai semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan, dimana hal ini berpeluang melahirkan solusi-solusi variatif yang sesuai dengan visi dan karakteristik para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan.

4. Partisipasi atas tanggung jawab bersama (*shared responsibility*), yaitu kegiatan partisipasi yang ditandai dengan model tanggung jawab, dimana terbagi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan.

### 2.1.2. Tingkat Partisipasi

Departemen Kehutanan membagi tingkat partisipasi menjadi 6 jenis yaitu :

(1). Manipulatif, (2). Menginformasikan, (3). Konsultasi, (4). Kemitraan, (5). Delegasi wewenang, (6). Kontrol masyarakat (Dephut, 2003). Menurut Hobley dalam Kusworo (2005) tingkat partisipasi dapat dirumuskan berbagai tingkatan dan arti partisipasi menjadi 7 tingkat yaitu :

1. Manipulasi Partisipatif, yaitu keanggotaan bersifat keterwakilan pada satu komisi kerja, dan atau kelompok. Jadi tidak berbasis pada partisipasi individu.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi, informasi datang dari administrator tanpa mendengar respon dari rakyat tentang keputusan atau informasi tersebut. Informasi yang dibagikan hanya untuk orang-orang luar yang profesional.
3. Partisipasi melalui konsultasi, yaitu partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. Orang dari luar mendefinisikan masalah-masalah dan proses pengumpulan informasi, dan mengawasi analisis. Proses konsultasi tersebut tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan, dan pandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang luar.

4. Partisipasi untuk insentif, yaitu partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumberdaya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan, atau insentif material lainnya. Mungkin saja petani menyediakan lahan dan tenaga, tetapi mereka dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model partisipasi ini adalah apabila insentif habis maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut.
5. Partisipasi fungsional, yaitu rakyat mungkin berpartisipasi melalui pemebentukan kelompok untuk penentuan tujuan yang terkait dengan proyek dan mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi kecenderungan yang terjadi keputusan tersebut diambil setelah keputusan utama ditetapkan oleh orang luar desa atau dari luar komunitas rakyat desa.
6. Partisipasi interaktif, yaitu partisipasi rakyat dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi dilihat sebagai suatu hak, tidak hanya berarti satu cara untuk mencapai target proyek saja. Proses melibatkan multi disiplin metodologi, ada proses belajar terstruktur sehingga kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada.
7. Partisipasi mandiri, yaitu partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk melakukan perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk *advise* mengenai sumberdaya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga tetap mengawasi bagaimana sumberdaya tersebut digunakan.

Dari tujuh arti partisipasi tersebut diatas dapat dikategorikan kedalam tiga tingkat yaitu : partisipasi manipulasi, partisipasi pasif dan partisipasi konsultasi dikategorikan dalam tingkat partisipasi rendah. Partisipasi insentif dan fungsional dikategorikan dalam tingkat partisipasi sedang. Partisipasi interaktif dan mandiri dikategorikan kedalam tingkat partisipasi tinggi (Awang *dalam* Kusworo, 2005).

### 2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Erwina (2009), terdapat tiga hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu : (i) keadaan sosial masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, kebiasaan dan kedudukan dalam sistem sosial, (ii) kegiatan pembangunan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dirumuskan dan dikendalikan oleh pemerintah dan (iii) keadaan alam sekitar yang mencakup faktor fisik atau keadaan geografis daerah yang ada pada lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut. Erwina (2009) menyatakan bahwa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi anggota masyarakat untuk berpartisipasi adalah : (i). adanya kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi, (ii). kemampuan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan (iii). kemauan anggota masyarakat untuk berpartisipasi.

Sedangkan menurut Trison (2010), partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dipengaruhi oleh faktor kemampuan, kemauan, dan kesempatan. Kemampuan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini diartikan sebagai penguasaan sejumlah pengetahuan dan keterampilan tertentu

dalam pengelolaan kegiatan reboisasi. Unsur kemampuan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, umur, dan kegiatan penyuluhan. Kemauan seseorang untuk berpartisipasi berkaitan dengan aspek mental dan hal ini tercakup faktor-faktor antara lain motivasi, persepsi, dan sifat kekosmopolitan. Kesempatan petani untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan menunjukkan adanya keadaan yang memungkinkan petani untuk berpartisipasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor antara lain status petani, tenaga kerja, dukungan pemerintah, kelembagaan sosial, pola kerjasama dan jarak lokasi kegiatan.

Pujo (2009) menyatakan bahwa ada dua sumber munculnya partisipasi, yaitu : partisipasi yang muncul dari dalam diri manusia itu sendiri dan partisipasi karena dorongan dari luar. Kedua bentuk partisipasi dari luar dapat berupa paksaan atau rangsangan terbuat dalam pembangunan. Sedangkan partisipasi yang muncul dalam diri manusia itu tanpa paksaan dan rangsangan dari luar.

Partisipasi muncul diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang yang disebut faktor intrinsik atau faktor dari luar diri. Faktor intrinsik dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman dan pendidikan, berbagai harapan, cita-cita menjangkau masa depan. Faktor dari luar dapat ditimbulkan oleh berbagai sumber, yaitu : lingkungan, kegiatan penyuluhan atau faktor lain yang sangat kompleks.

Pujo (2009) menyebutkan bahwa untuk menunjang keberhasilan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan khususnya masyarakat pedesaan diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yang dapat dikatakan

sebagai elemen-elemen yang menonjol dan konsisten yang dinamakan anatomi partisipasi masyarakat, yang terdiri dari dua belas yaitu :

- (1). Ada masalah atau kepentingan yang dirasakan bersama oleh sebahagian masyarakat, yang kemudian diangkat ke permukaan oleh seseorang/beberapa orang pemrakarsa yang terpercaya atau di hormati, yang dianggap memiliki pengaruh atau kekuasaan di kalangan masyarakatnya.
- (2). Ada bentuk atau cara pemecahan masalah yang dirumuskan melalui mekanisme sosial, yang pada awalnya bersifat informal tetapi menjurus ke bentuk atau yang bersifat formal, seperti melalui musyawarah desa, mufakat bersama, dan sebagainya.
- (3). Ada tujuan kegiatan yang dimufakati secara bersama-sama.
- (4). Ada komitmen yang tinggi untuk secara tekun mencapai tujuan kegiatan bersama demi memecahkan masalah atau kepentingan bersama.
- (5). Ada kegiatan nyata untuk mencapai tujuan bersama dan sekaligus menjadi wadah partisipasi masyarakat.
- (6). Ada semacam tekanan sosial atau tekanan kelompok terdekat (group pressure), atau pimpinan kolektif kader, membuat orang segan atau khawatir jika tidak ikut kegiatan.
- (7). Ada berbagai peran dalam konteks partisipasi masyarakat yang cukup jelas yang sebelumnya dimufakati secara terbuka.

- (8). Ada keterbukaan dari para pemimpin baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat yang wajar dan mandiri.
- (9). Ada organisasi yang menjamin jaringan komunikasi dan pengelolaan yang melembaga, yang meskipun informal, mampu mewadahi dan mengatur proses kegiatan.
- (10). Ada hasil nyata, kelihatan oleh semuanya, dan dinikmati bersama.
- (11). Ada pemimpin dan kepemimpinan untuk mengatur jalannya roda organisasi memberikan suri tauladan, bimbingan dan pembinaan.
- (12). Ada tolok ukur keberhasilan partisipasi yaitu kemandirian dan pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan menurut Goldsmith dan Blustain *dalam* Ndraha (2010), syarat keberhasilan partisipasi mencakup : (1) kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (2) adanya motivasi dari pemimpin masyarakatnya, (3) partisipasinya itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal, (4) dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.

Ndraha (2010) menyatakan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

- (1). Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau sudah ada di tengah-tengah masyarakat.
- (2). Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

- (3). Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- (4). Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.

Namun secara umum Murray *dalam* Kusworo (2005) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat berupa : (1). Tingkat Pendidikan, (2). Jenis pekerjaan, (3). Penghasilan. Memperhatikan sumber datangnya, menurut Suryono *dalam* Kusworo (2005) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adalah faktor yang berasal dari dalam individu masyarakat (intrinsik) berupa : (1). Umur, (2). Tingkat pendidikan, (3). Tingkat pendapatan, (4). Motivasi, dan (5). Persepsi, dan faktor yang berasal dari luar individu (eksterinsik) berupa : (1). Penyuluhan, bimbingan atau pelatihan, (2). Kepemilikan lahan usaha tani, dan (3). Jumlah anggota keluarga.

## 2.2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian system pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai (Kementerian Kehutanan, 2010). Rehabilitasi mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan ketika system perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degradasi fungsi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplementasikan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sistem rehabilitasi hutan dan

lahan dicirikan oleh komponen sebagai berikut : komponen obyek rehabilitasi hutan dan lahan, komponen teknologi, dan komponen institusi.

Sistem rehabilitasi hutan dan lahan merupakan system yang terbuka, yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan penggunaan hutan dan lahan. Dengan demikian pada prinsipnya rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan atas inisiatif bersama para pihak. Dengan kata lain, kedepannya rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan oleh masyarakat dengan kekuatan utama dari masyarakat sendiri. Menurut Sudarmadji (2011) yang mengatakan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan harus melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan hendaknya lebih banyak melibatkan unsur masyarakat dengan melalui pendekatan *bottom-up* akan mendapatkan hasil yang lebih baik, karena adanya unsur partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan sebagai subyek pembangunan.

Terdapat beberapa pendekatan untuk mengatasi degradasi dan mempercepat proses pemulihan ekosistem (*recovery*). Pendekatan pertama adalah restorasi (*restoration*) yang didefinisikan sebagai upaya untuk memulihkan kembali (*recreate*) ekosistem hutan aslinya melalui penanaman dengan jenis tanaman asli yang ada pada kawasan atau lahan tersebut sebelumnya. Pendekatan kedua melalui rehabilitasi yang diartikan sebagai penanaman hutan dengan jenis asli dan *exotic* (Trison, 2010). Dalam hal ini tidak ada upaya untuk menata ulang ekosistem asli. Tujuannya hanya untuk mengembalikan hutan pada kondisi stabil dan produktif. Oleh karena itu ekosistem hutan yang terbentuk adalah campuran termasuk jenis

asli. Alternatif terakhir adalah reklamasi yang berarti penggunaan jenis-jenis *exotic* untuk menstabilkan dan meningkatkan produktifitas ekosistem hutan. Dalam hal ini tidak ada sama sekali upaya perbaikan biodiversitas asli dari suatu areal yang terdegradasi.

Upaya dalam penanggulangan kerusakan hutan dan lahan yang telah dilaksanakan pada dasarnya belum sebanding dengan laju kerusakan hutan yang terjadi, sehingga belum banyak berdampak nyata dalam memulihkan lingkungan hidup (Trison, 2010). Selanjutnya disadari pula bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada masa lampau memiliki berbagai kelemahan diantaranya belum terintegrasinya sistem perencanaan di daerah/wilayah sehingga sinergi pelaksanaan antar sektor belum optimal, tidak terjaminnya kesinambungan pemeliharaan tanaman hutan dan lahan yang telah direhabilitasi serta peranan *stakeholder* sebagai inisiator dan pengelola rehabilitasi hutan dan lahan belum muncul. Hikmat (2010), Rehabilitasi hutan dan lahan pada dasarnya merupakan gerakan moral untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS prioritas. Pelaksanaannya perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan terintegrasi, serta melibatkan multi pihak melalui pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Pujo (2009), bahwa dalam era rehabilitasi dan konservasi, upaya-upaya yang ditempuh bukan hanya terkait dengan upaya peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, tetapi pada saat yang sama juga perlu ditingkatkan upaya-upaya yang bertujuan untuk meminimalisir penyebab kerusakan hutan dan lahan.

Selanjutnya secara spesifik permasalahan kehutanan yang cukup nyata dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya pada kegiatan reboisasi dan hutan rakyat pada masa lampau yang menyebabkan kegagalan tanaman antara lain (Kementerian Kehutanan, 2010) :

- 1). Di dalam lokasi areal reboisasi terdapat perkebunan rakyat sehingga menyebabkan tanaman reboisasi mengalami kerusakan karena dibakar dan ditebas oleh masyarakat.
- (2). Jenis tanaman yang dipilih untuk ditanam belum sepenuhnya disesuaikan dengan keinginan masyarakat dan kondisi iklim/lokasi setempat.
- (3). Kegiatan pemeliharaan terhadap tanaman reboisasi dan hutan rakyat hanya dilakukan untuk waktu 2 tahun setelah penanaman, sehingga tanaman setelah proyek berakhir kurang mendapatkan pemeliharaan dan pengawasan.
- (4). Proses pencairan anggaran tidak selalu tepat waktu dengan musim tanam yaitu pada musim penghujan anggaran belum keluar dan pada musim kemarau anggaran baru keluar. Hal ini menyebabkan banyak kegagalan tanaman reboisasi dan hutan rakyat akibat penanaman tidak sesuai dengan jadwal penanaman.
- (5). Belum terlihat secara nyata perhatian dan kepedulian masyarakat luas atas kegiatan reboisasi dan hutan rakyat yang dilaksanakan.
- (6). Masih terdapatnya “mental proyek” pada sebagian masyarakat terhadap kegiatan reboisasi dan hutan rakyat dan menganggap kegiatan reboisasi dan hutan rakyat bukan sebagai suatu gerakan moral dalam pemulihan

lingkungan.

- (7). Belum terdapat kriteria penilaian mengenai keberhasilan stakeholder ditingkat lapangan yang dikaitkan dengan tanggung jawab dalam mengamankan hasil kegiatan pembangunan lingkungan hidup.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan reboisasi dan hutan rakyat dapat ditentukan oleh ada tidaknya partisipasi masyarakat pada nomor 1, 2, 5, dan 6, sedangkan faktor anggaran/dana terdapat pada nomor 3, dan 4, terakhir *reward dan punishment* terdapat pada nomor 7.

Arah kebijakan pembangunan daerah yang terkait dengan sektor kehutanan di daerah sebagai bagian dari aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup dari 11 butir kebijakan maka yang terkait dengan kehutanan meliputi 10 butir (Kementerian Kehutanan, 2010):

1. Mengelola sumberdaya alam dengan prinsip peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi melalui pendekatan mekanisme pasar (*market based instrument*) yang terkendali.
2. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup serta pemanfaatannya dalam melakukan konservasi dan rehabilitasi serta penghematan penggunaannya dengan penerapan teknologi berwawasan lingkungan.
3. Mengoptimalkan kewenangan propinsi, kabupaten dan kota dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan efisien agar pemeliharaan lingkungan hidup secara selektif sehingga situasi dan kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan perundang-undangan

dan peraturan daerah.

4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan fungsi keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi, budaya masyarakat dan penataan ruang penguasaannya yang diatur oleh peraturan daerah.
5. Menetapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan, keterbaharuan dan pengolahan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
6. Mengatur penguasaan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah dan pengalihan hak atas tanah dengan mengedepankan aspek hukum dan kepentingan umum.
7. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan pengelolaannya diatur dengan peraturan daerah.
8. Mempertahankan dan memulihkan kondisi kawasan lindung agar terjaga keseimbangan lingkungan dan berfungsi baik sebagai perlindungan sumber-sumber air, tanah longsor, banjir, erosi, dan sedimentasi.
9. Mengatur pengamanan terhadap garis pantai terutama guna menjaga pelestarian tanaman bakau, biota laut, terumbu karang, dan lain-lain.
10. Mengusahakan pengelolaan sumber daya hutan dan kebun serta kawasan

konservasi dengan azas kelestarian dan optimalisasi manfaat dengan mewujudkan peran serta masyarakat.

Dari arah kebijakan pembangunan daerah dimaksud dan memperhatikan perkembangan kegiatan pembangunan yang ada dewasa ini, maka upaya penyelamatan sumber daya hutan sudah saatnya memerlukan perangkat peraturan yang lebih tegas terutama untuk menghentikan segala bentuk aktivitas penebangan kayu *illegal* dari dalam kawasan hutan dan okupasi kawasan hutan oleh masyarakat guna keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan. Dalam kaitan tersebut maka kontribusi pembangunan kehutanan di daerah/wilayah terhadap pendapatan asli daerah hendaknya beberapa tahun ke depan dihitung melalui pendekatan kemajuan mutu baku lingkungan fisik (Trison, 2010).

### 2.3. Reboisasi

Reboisasi adalah upaya pembuatan tanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan (Kementerian Kehutanan, 2010). Sasaran pembuatan tanaman reboisasi adalah areal pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang telah mengalami degradasi/penurunan kualitas hutan (kawasan hutan terbuka/lahan kosong, alang-alang, semak belukar), dalam suatu wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas. Reboisasi bertujuan untuk memulihkan lahan kritis yang tidak atau kurang berperan sesuai dengan fungsinya dalam kawasan hutan yang keadaannya membahayakan stabilitas dan kontinuitas tata air

serta keselamatan alam lingkungan, terutama pada kawasan yang lingkungan pengaruhnya terdapat konsentrasi penduduk, bangunan prasarana dan investasi besar serta vital dalam perekonomian (Kementerian Kehutanan, 2010).

Menurut Kementerian Kehutanan (2010), kegiatan reboisasi meliputi 3 tahap yaitu :

- 1). Perencanaan terdiri dari (a). pemilihan lokasi, (b). penyusunan rancangan teknis.
- (2). Pelaksanaan terdiri dari (a). persiapan lahan, (b). persiapan penanaman, (c). pembuatan tanaman, (d). pemeliharaan tahun I, (e). penilaian tanaman tahun I, (f). pemeliharaan tahun II, (g). penilaian tahun II.
- (3). Pengawasan dan pengendalian

Secara spesifik tujuan pokok reboisasi adalah tertanamnya kembali kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang terdegradasi dengan bibit tanaman berkualitas sehingga mampu memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan sebagai perlindungan system penyangga kehidupan, pengatur tata air, (antara lain mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut), yang selanjutnya dapat mendukung kelestarian produksi dan kualitas sumberdaya hutan, perbaikan iklim mikro, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paembonan (2006) mengemukakan bahwa secara umum reboisasi diarahkan kepada pencapaian hasil yang mempunyai manfaat ganda, yaitu tata air, perlindungan dan produksi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta dengan cara yang paling berdayaguna dan berhasil guna.

Untuk daerah yang beriklim kering dan sedikit curah hujan, reboisasi diarahkan pada hasil air yang maksimum, tanpa mengesampingkan fungsinya sebagai pengawetan tanah, pencegah erosi dan banjir. Sifat dan ciri vegetasi menjadi sangat penting, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi air oleh vegetasi di tempat-tempat terbuka akibat aktivitas pembalakan masih tetap lebih kecil daripada konsumsi air oleh vegetasi di hutan yang tidak ditebang (Asdak, 2001 : 455). Selanjutnya dikatakan apabila reboisasi dilakukan pada daerah-daerah yang curah hujan tinggi, maka yang lebih diutamakan adalah peranannya dalam mencegah erosi dan banjir. Pada daerah yang demikian diperlukan penutupan tanah secara cepat oleh lapisan tajuk pohon yang ditanam dengan jarak yang dekat dan pembentukan lantai hutan yang baik.

Arsyad (2009) mengemukakan bahwa intensitas penutupan vegetasi sangat menentukan besarnya erosi. Berbagai jenis tanaman dan penggunaan tanah mempunyai efisiensi yang berlainan dalam pengawetan tanah. Efisiensi lebih tinggi pada vegetasi permanen seperti hutan lebat dengan semak dan serasah, padang rumput lebat, kebun tanaman tahunan dengan penutupan yang baik.

Permasalahan dalam rehabilitasi hutan dan lahan adalah pemilihan jenis-jenis pohon atau tanaman yang sesuai. Penanaman jenis yang tidak sesuai hanya akan merupakan pemborosan biaya, waktu, dan tenaga. Secara umum karakteristik jenis pohon yang dapat digunakan sebagai pencegah erosi adalah :

1. Dapat hidup bersaing dan cepat tumbuh pada tempat-tempat yang miskin hara atau daerah yang kritis.
2. Sanggup memproduksi serasah yang banyak.

3. Sistem perakaran harus luas dan kuat dengan akar serabut yang banyak. Di daerah yang sering terjadi longsor, system perakaran yang dalam diperlukan.
4. Mudah ditanam dan tidak banyak memerlukan pemeliharaan.
5. Sanggup membentuk tajuk yang rapat dan berdaun sepanjang tahun atau paling kurang sepanjang musim hujan.
6. Dapat meningkatkan kesuburan tanah.
7. Tahan terhadap hama penyakit dan hewan-hewan kecil.
8. Dapat memberikan keuntungan ekonomi, khususnya dalam waktu yang singkat seperti buah, biji-bijian, makanan ternak dan hasil-hasil lainnya (Sattar, 2008).

Penggunaan jenis tanaman local untuk reboisasi perlu untuk dipertimbangkan seperti yang dikemukakan oleh Paembonan (2006) bahwa penanaman kembali lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan harus didasarkan pada pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan factor-faktor tempat tumbuh dan keinginan masyarakat, di mana perlu diprioritaskan tanaman jenis lokal yang cepat tumbuh.

#### 2.4. Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dikemukakan beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis ditempat lain sebagai berikut :

1. Syairazi, H (2006), meneliti pengaruh partisipasi masyarakat dalam kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan menemukan bahwa partisipasi masyarakat

peserta kegiatan GERHAN dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan kegiatan GERHAN. Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan besar pengaruhnya terhadap keberhasilan GERHAN. Tingginya partisipasi pada tahap pelaksanaan kegiatan karena masyarakat mendapat manfaat langsung berupa bibit, peralatan pertanian dan saprodi berupa pupuk dan obat-obatan, selain itu ada insentif/upah bagi peserta pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

2. Kusworo (2005), meneliti partisipasi masyarakat dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) menemukan bahwa bimbingan/penyuluhan dan jumlah anggota keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat baik anggota kelompok maupun non anggota kelompok. Motivasi dan luas lahan hanya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota kelompok. Sedangkan umur hanya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi non anggota kelompok.
3. Arfides (2005) meneliti partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan kritis (studi kasus di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan kritis ditentukan oleh berbagai faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel bimbingan dan penyuluhan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan kritis. Sedangkan umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan luas kepemilikan

lahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan kritis di Nagari Paninggahan.

## 2.5. Kerangka Pemikiran

Dalam merumuskan kerangka berfikir, penulis merujuk kepada beberapa teori yang dikemukakan antara lain oleh Slamet *dalam* Arfides (2005) mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga syarat yang harus di perlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan yaitu : (1). Adanya kemauan untuk berpartisipasi, (2). Adanya kemampuan untuk berpartisipasi, (3). Adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kesempatan tersebut berupa adanya suatu wadah/organisasi untuk menyalurkan partisipasi, kemauan tersebut berupa adanya sikap positif dari setiap masyarakat untuk berpartisipasi, kemampuan tersebut berupa kondisi-kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti : pendidikan, kesejahteraan, usia dan lain-lain. Harun *dalam* Arfides (2005) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, tingkat pengetahuan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pengembangan organisasi sosial.

Darsosentono *dalam* Arfides (2005) menyatakan bahwa partisipasi sangat dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan baik fisik maupun psikis, pengetahuan yang memadai, bimbingan dan penyuluhan serta kemampuan finansial yang mendukung.

Berdasarkan teori diatas dapat dirumuskan kerangka berfikir yaitu terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu : (1). Faktor Internal atau yang berasal dari dalam diri individu sendiri meliputi motivasi dan

persepsi, dan (2). Faktor eksternal atau yang berasal dari luar individu yaitu penyuluhan, tingkat pendapatan dan lama tinggal.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diutarakan diatas, maka dapat dibuat kerangka berpikir sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang di laksanakan di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan Kelurahan Tarantang, Kecamatan Pauh Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kelurahan Bungus Timur dan Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang. Menurut pembagian wilayah dan letak administratif, DAS Arau terhampar pada ke empat kecamatan tersebut dalam wilayah Kota Padang yang merupakan DAS prioritas tempat dilaksanakannya kegiatan reboisasi dan hutan rakyat.

Penelitian Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2012 di Kecamatan Lubuk Kilangan, Pauh, Bungus Teluk Kabung dan Koto Tangah di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

#### **3.2. Bahan Penelitian**

Bahan-bahan yang digunakan didalam penelitian Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang adalah data primer berupa variabel-variabel dalam bentuk indikator sebagai instrumen atau alat ukur dalam bentuk kuesioner, dan data sekunder berupa informasi lokasi penelitian dan dokumen pendukung yang diperoleh dari dinas/instansi yang terkait

dengan penelitian. Objek penelitian adalah masyarakat yang bermukim disekitar DAS Arau dalam bentuk anggota kelompok tani yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang terlibat langsung dalam kegiatan reboisasi dan hutan rakyat.

### **3.3. Metoda Penelitian**

#### **3.3.1. Disain Penelitian**

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang didukung dengan metode kualitatif. Pada metode kuantitatif, indikator sebagai instrumen akan diukur dengan angka dan di analisis dengan prosedur statistik. Sedangkan metode kualitatif dapat digunakan untuk membantu dan melengkapi dalam penjelasan tentang metode kuantitatif (Creswell J.W, 2002 : 177).

#### **3.3.2. Operasional Konsep/Variabel**

Variabel- variabel yang akan dipelajari dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Sebagai variabel bebas adalah faktor internal seperti persepsi, dan motivasi. Faktor eksternal penyuluhan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan. Sedangkan variabel tak bebas adalah partisipasi (Y) petani terhadap kegiatan reboisasi. Interaksi variabel-variabel ini akan dipelajari melalui data yang diperoleh di lapangan.

Variabel yang telah ditetapkan tersebut di uraikan menjadi sub variabel, dan sub variabel diturunkan dalam bentuk indikator sebagai instrumen atau alat ukur dalam pengumpulan data primer di lapangan. Indikator yang digunakan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tanggal 3 April 2012.

Untuk lebih jelasnya, adapun pengertian dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut yaitu :

#### **A. Faktor Internal**

Faktor internal adalah dorongan atau sikap yang tumbuh dan berkembang dalam diri petani untuk berpartisipasi seperti :

- 1) Motivasi (X1) adalah merupakan keadaan dalam individu yang mendorong seseorang berperilaku kearah tujuan.
- 2) Persepsi (X2) adalah pemahaman atau pendapat masyarakat yang menjadi responden terhadap rehabilitasi hutan dan lahan

#### **B. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah dorongan atau sikap petani yang dipengaruhi oleh lingkungan untuk berpartisipasi (Sattar, 2008) seperti :

- 1) Penyuluhan (X3) adalah aktivitas penyampaian informasi mengenai RHL yang ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan kemauan untuk terlibat dalam kegiatan RHL.
- 2) Lama tinggal (X4) adalah lamanya keberadaan anggota masyarakat untuk

berdomisili pada satu tempat yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan.

- 3) Tingkat Pendapatan (X5) adalah rata-rata pendapatan keluarga yang dihasilkan oleh kepala keluarga per-bulan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

### **C. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Y)**

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dalam bentuk kegiatan yang meliputi :

- (1) Perencanaan kegiatan reboisasi (Y1) adalah keterlibatan petani dalam proses pengambilan keputusan yang rasional tentang kegiatan reboisasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan reboisasi (Y2) adalah keterlibatan petani dalam kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi kegiatan reboisasi (Y3) adalah keterlibatan petani untuk menilai hasil yang telah dicapai bersama.

#### **3.3.3. Sumber Data dan Cara Penentuan Sampel Penelitian**

Mengingat bahwa penelitian ini berhubungan dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi dan hutan rakyat, maka kelurahan yang ditetapkan sebagai sampel adalah kelurahan yang ada kegiatan reboisasi dan hutan rakyat pada masing-masing kecamatan. Populasi penelitian

ini adalah seluruh petani peserta anggota kelompok tani di 4 (empat) kecamatan yang terlibat langsung dalam kegiatan reboisasi dan hutan rakyat. Kelompok tani peserta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota dimana dalam pelaksanaan kegiatan antara pengurus dan anggotanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Untuk menentukan jumlah sampel terlebih dahulu harus menentukan jumlah populasi yang diteliti. Berdasarkan jumlah populasi dari keseluruhan petani peserta kegiatan reboisasi dan hutan rakyat sebesar 200 populasi dari 5 kelompok tani, maka dalam menentukan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus Frank Lynch (Sudjana, 2002) sebagai berikut :

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p(1-p)}{N \cdot d^2 + Z^2 \cdot p(1-p)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

p = Populasi terbesar yang mungkin terjadi (0,5)

d = Sampling error (0,1)

N = Jumlah populasi

Z = Nilai variabel nominal (1,96)

(Mochtar. M., 1998 : 44)

Dengan demikian jumlah sampel (responden) yang diperlukan dalam penelitian Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang ini adalah 65 orang. Setelah di ketahui jumlah sampel, kemudian responden dipilih dengan menggunakan metode pengambilan sampel acak sederhana (*Simple Random Sampling*), sehingga semua petani

mempunyai peluang yang sama untuk menjadi responden. Langkah yang dilakukan dalam pengambilan sampel acak sederhana adalah berdasarkan daftar nama-nama anggota kelompok tani yang terdapat pada empat kecamatan (lima kelompok tani) sebagai populasi (N). Kemudian ditentukan interval sampel dengan rumus :

$$K = \frac{N}{n}$$

Keterangan :

K = Interval sampel

N = Jumlah seluruh anggota kelompok tani

n = Jumlah sampel (jumlah responden)

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Data Primer**

Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada kelompok petani peserta kegiatan reboisasi dan hutan rakyat yang telah ditentukan sebagai responden dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (kuesioner), tokoh masyarakat dan petugas terkait. Instrumen atau alat ukur yang digunakan adalah dalam bentuk kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer dan pedoman wawancara untuk kepentingan kelengkapan penjelasan data primer juga untuk kepentingan pengamatan lapangan. Selain itu juga dilakukan pengamatan langsung ke lokasi rehabilitasi hutan dan lahan di lapangan.

#### **B. Data Sekunder**

Data sekunder yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan keadaan geografis dan demografi lokasi penelitian yang ada hubungan dengan kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan. Data tersebut diperoleh dari dinas/instansi yang terkait seperti Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan Provinsi Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, Badan Metreologi dan Geofisika Kota Padang, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan pada daerah sampel penelitian. Adapun jenis data sekunder yang diperlukan tersaji dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jenis data sekunder dan sumberdata.

No	Jenis Data Sekunder	Sumber Data
1.	Data demografi lokasi penelitian	Kantor Kecamatan dan kelurahan
2.	Data lahan kritis	BPDAS, Dipernakbunhut Kota Padang.
3.	Peta lahan kritis	BPDAS, Dipernakbunhut Kota Padang.
4.	Peta lokasi penanaman	Dipernakbunhut Kota Padang..
5.	Rancangan teknis reboisasi & HR	Dipernakbunhut Kota Padang..
6.	Petunjuk Pelaksanaan reboisasi & HR	Dipernakbunhut Kota Padang..
7.	Kebijakan & peraturan ttg reboisasi	Dishut.Prov.Sumbar& Dipernakbunhut Kota Padang.
8.	Data iklim, curah hujan	Kantor BMG Kota Padang
9.	Data jumlah penyuluh	Dipernakbunhut Kota Padang..

#### 3.3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data adalah :

1. Wawancara yaitu dengan menggunakan kuesioner berupa pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka. Dimana pertanyaan tertutup sudah disediakan alternatif jawaban, sehingga responden hanya memilih salah satu alternatif jawaban yang anggap sesuai dengan kenyataan, sedangkan pertanyaan

terbuka diberi kesempatan untuk responden menjawab secara bebas.

2. Observasi yaitu dengan melihat kunjungan ke lapangan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui kuesioner.
3. Studi kepustakaan dan dokumentasi, dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan bacaan seperti buku-buku teoritik, jurnal, dokumen, makalah ilmiah, dan laporan termasuk berbagai peraturan dan kebijakan dari Pemda Kota Padang yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 3.3.5. Rancangan Analisis/Rancangan Uji Hipotesis

Analisis data penelitian dilakukan guna menjawab masalah, tujuan, dan menguji hipotesis yang telah diajukan atau dirumuskan dengan menggunakan analisis jalur (*Path analysis*).

Menurut Riduwan dan Akdon dalam Wulansari (2003), jenis skala yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasikan persepsi seseorang adalah **Skala Likert**. Skala ini berisi pernyataan-pernyataan sikap dari responden terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi. Dengan menggunakan skala likert, variabel diuraikan menjadi sub variabel dan sub variabel diuraikan lagi menjadi indikator yang akan di ukur dengan angka. Skala liker yang digunakan terdiri dari (Wulansari, 2003):

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Ragu-Ragu (RR)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

Jawaban yang diberikan oleh setiap responden merupakan skala ordinal dengan kriteria dan penilaian skor sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Skor dan Kriteria Penilaian Skala Likert (Wulansari, 2003)

Penilaian	Skor		Kriteria
	Positif	Negatif	
a	5	1	SS
b	4	2	S
c	3	3	R
d	2	4	TS
e	1	5	STS

Dalam analisis jalur, data yang digunakan adalah berupa skor total atau skor rata-rata yang diasumsikan tidak terdapat kesalahan dalam pengukuran, sehingga jika akan menggunakan analisis jalur harus menggunakan instrumen-instrumen yang benar-benar telah diuji validitas (*product moment*) dan reliabelitasnya (*Spearman-Brown Correction*) dengan menggunakan program komputerisasi (Juanim, 2004).

Selanjutnya data dari variabel independen dan dependen dari semua sampel penelitian untuk diuji hipotesisnya. Untuk meneliti hubungan diantara variabel penelitian, data hasil tabulasi diolah dengan melalui analisis jalur. Analisis ini digunakan untuk menentukan berapa besarnya suatu pengaruh variabel terhadap variabel lainnya. Besarnya pengaruh dari suatu variabel penyebab (*independent = X*) ke variabel akibat (*dependent = Y*) disebut koefisien jalur dan diberi simbol  $P_{xyi}$  (Dillon & Goldstein; 1984 ; 438 dalam Harun Al-Rasyid, 1994). Data yang diolah merupakan data yang berasal dari sebuah sampel berukuran n.

Untuk mempercepat proses perhitungan, akan dibantu dengan menggunakan program komputerisasi (SPSS dan Lisrel).

Untuk menjawab rumusan masalah, pertanyaan peneliti dan menguji hipotesa maka dilakukan uji statistik berdasarkan data hasil jawaban responden (65 responden) berupa kuesioner. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan masing-masing variabel dependent (Y) dan variabel independent (X). Ke-dua variabel dependent (Y) dan variabel independent (X) di gunakan sebagai input analisis uji statistik untuk mendapatkan persamaan model analisis jalur .

Metode analisis jalur digunakan untuk dapat mencari hubungan kausal atau pengaruh diantara variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang disimbolkan dengan Y. Sedangkan variabel independen yaitu faktor internal dan faktor eksternal disimbolkan dengan X yang terdiri dari 5 variabel yaitu motivasi (X1), persepsi (X2), penyuluhan (X3), lama tinggal (X4), dan tingkat pendapatan (X5). Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan perhitungan komputerisasi didapat persamaan struktural sebagai berikut :

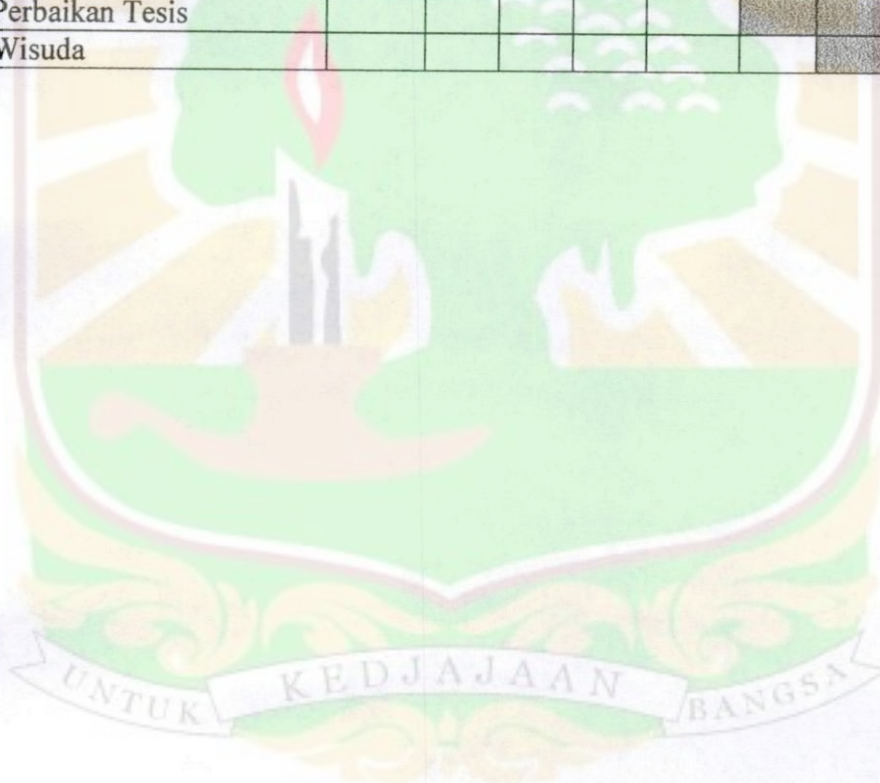
$$Y = b_0 + b_1X1 + b_2X2 + b_3X3 + b_4X4 + b_5X5 + \epsilon$$

### 3.3.6. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 : Jadwal Penelitian.

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan 2012/2013						
		Agus	Sept	Okto	Nov.	Des	Jan	Feb
1.	Persiapan							
2.	Seminar Usulan Penelitian							
3.	Pengumpulan Data							
4.	Pengolahan Data							
5.	Penulisan Tesis							
6.	Konsultasi Tesis							
7.	Seminar Hasil Penelitian							
8.	Sidang Tesis							
9.	Perbaikan Tesis							
10.	Wisuda							



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Kondisi Biofisik DAS Arau

##### 4.1.1. Luas dan Bentuk DAS

DAS Arau memiliki luas 52.740 hektar, terdiri dari 3 (tiga) DAS, yaitu DAS Batang Arau (17.467 ha), DAS Batang Kuranji (22.470 ha) dan DAS Batang Air Dingin (12.803 ha). Secara administratif SWP DAS Arau terletak di Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan, seperti terlihat pada Tabel 4.1. Bagian terbesar berada di Kota Padang (98,9%), sedangkan pada tiga kabupaten yang lain (1,1 %), hanya meliputi sebagian kecil hulu DAS dan merupakan hutan konservasi.

Tabel 4.1. Wilayah Administratif dan Luas Wilayah DAS Arau

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Luas (ha)	Luas Wilayah DAS (ha)			
			Bt Arau	Bt Kuranji	Bt Air Dingin	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Kota Padang</b>	<b>69.496</b>				<b>52.162</b>
1	Bungus Teluk Kabung	8.275	11			11
2	Lubuk Kilangan	8.516	7.855	11		7.866
3	Lubuk Begalung	2.956	2.743			2.743
4	Pauh	15.898	3.563	11.936	406	15.905
5	Kuranji	6.031	244	5.787		6.031
6	Padang Selatan	1.259	1.211			1.211
7	Padang Timur	947	947			947
8	Padang Barat	492	475			475
9	Padang Utara	894	195	699		894

1	2	3	4	5	6	7
10	Nanggalo	1.034		1.034		1.034
11	Koto Tangah	23.195		2.839	12.207	15.045
<b>II.</b>	<b>Kab. Solok</b>	<b>329.328</b>				<b>397</b>
1	X Koto Singkarak	26.743		35	176	210
2	Gunung Talang	28.397	57	19		76
3	Kubung	28.396		111		111
	<b>Kab. Padang</b>	<b>136.380</b>				<b>14</b>
<b>III</b>	<b>Pariaman</b>					
1	Batang Anai	17.709			14	14
<b>IV</b>	<b>Kab. Pesisir Selatan</b>	<b>610.901</b>				<b>167</b>
1	Koto XI Tarusan		167			167
	<b>Jumlah</b>		<b>17.467</b>	<b>22.470</b>	<b>12.803</b>	<b>52.740</b>

Sumber : Hasil Analisis Peta SWP DAS Arau, (BPDAS AK, 2011)

DAS Batang Arau di sebelah utara berbatasan dengan DAS Batang Kuranji; di sebelah selatan dengan DAS Timbalun dan DAS Batang Tarusan; di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok; dan di sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Secara geografis, DAS Batang Arau terletak pada  $0^{\circ}48' - 0^{\circ}56'LS$  dan  $100^{\circ}21' - 100^{\circ}33' BT$ , dengan ketinggian  $0 - 1.210 M$  dari permukaan laut. Sungai Batang Arau merupakan sungai utama pada DAS Batang Arau, yang sumber airnya berasal dari sungai Lubuk Paraku, Sungai Padang Idas, dan Sungai Lubuk Sarik. Daerah tangkapan air DAS Batang Arau bagian hulu relatif lebih kecil dibanding dengan dua DAS lainnya, hanya sekitar 3.090 hektar ( $30.90 \text{ Km}^2$ ), meliputi kawasan konservasi, hutan lindung dan lahan milik masyarakat.

DAS Batang Kuranji di sebelah utara berbatasan dengan Daerah Tangkapan Air Singkarak; di sebelah timur dengan DAS Sumani; di sebelah barat dengan

DAS Batang Air Dingin dan Samudera Indonesia; serta di sebelah Selatan dengan DAS Batang Arau. Secara geografis, DAS Batang Kuranji terletak pada  $0^{\circ}48' - 0^{\circ}56'LS$  dan  $100^{\circ}21 - 100^{\circ}33' BT$ , dengan ketinggian  $0 - 1.858 M$  dari permukaan laut. Batang Kuranji merupakan sungai utama pada DAS Batang Kuranji yang berhulu dari Gunung Sakai, dan sumber airnya berasal dari sungai Padang Jariah, Sungai Padang Karuah dan Sungai Limau Manih. Luas daerah tangkapan air bagian hulu DAS Batang Kuranji sekitar 7.875 hektar, meliputi kawasan konservasi, hutan lindung dan lahan milik.

DAS Batang Air Dingin di sebelah utara berbatasan dengan Daerah Tangkapan Air Singkarak; di sebelah timur dengan DAS Sumani; di sebelah barat dengan DAS Batang Kandis dan Samudera Indonesia; dan di sebelah Selatan dengan DAS Batang Kuranji. Secara geografis, DAS Batang Air Dingin terletak pada  $0^{\circ}48' - 0^{\circ}56'Lintang Selatan$  dan  $100^{\circ}21 - 100^{\circ}33' Bujur Timur$ , dengan ketinggian  $0 - 1.210 M dpl$ . Batang Air Dingin merupakan sungai utama pada DAS Batang Air Dingin, yang sumber airnya berasal dari beberapa anak sungai di wilayah hulu seperti sungai Kapecong, Sungai Air Tiris, Sungai Latuang, Batang Sako dan Sungai Abu. Luas daerah tangkapan air bagian hulu DAS Batang Air Dingin sekitar 12.000 hektar ( $120 Km^2$ ), meliputi kawasan konservasi, hutan lindung dan lahan milik masyarakat.

#### 4.1.2. Topografi Wilayah

Kondisi topografi suatu DAS akan menggambarkan keadaan kemiringan lereng DAS tersebut. Makin miring suatu DAS semakin cepat merambatnya aliran permukaan, sehingga waktu kumpul lebih pendek dan puncak banjir akan lebih tinggi. Daya serap tanah cenderung lebih rendah dengan demikian pengisian air bawah tanah juga sedikit. Dari analisis peta kelerengan DAS Arau maka didapatkan bahwa keadaan topografi dan bentuk wilayah DAS Arau didominasi oleh tingkat kelerengan agak curam sampai dengan sangat curam. Hal ini disebabkan karena derajat kemiringan lereng DAS semakin ke hulu semakin besar. Pada daerah hulu, tingkat kemiringan lereng dominan adalah curam sampai sangat curam, sehingga kecepatan aliran air dipermukaan akan lebih tinggi menuju alur-alur sungai.

#### 4.1.3. Iklim

Berdasarkan klasifikasi Schmidt – Ferguson, DAS Arau memiliki tipe iklim A yaitu iklim sangat basah. Curah hujan cukup tinggi, berkisar antara 3.680 – 4.017 mm/tahun dengan sebaran curah hujan tertinggi pada DAS Batang Air Dingin dan terendah pada DAS Batang Arau.

#### 4.1.4. Tanah

Secara umum jenis tanah pada DAS Arau terdiri dari : Regosol (3,24%), Glei Humus (6,46 %), Kambisol (89,20 % mulai dari sifat agak peka sampai peka) dan Organosol (1,1%). Dari hasil kajian Tim BPDAS Agam Kuantan (2011),

tanah pada DAS Arau didominasi oleh tanah yang berorder Inceptisol yaitu tanah muda yang masih berkembang tetapi lebih berkembang daripada Entisol dan cukup subur, Entisol dan Ultisol serta ada juga asosiasi dari jenis jenis tanah tersebut. Tanah daerah ini juga termasuk intensif tercuci oleh air hujan sehingga permukaan tanah terlihat agak pucat dan kasar.

#### 4.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pada DAS Arau didominasi oleh hutan, kemudian untuk pertanian, kebun campuran, pemukiman dan industri. Tata guna lahan pada DAS Arau masih didominasi oleh vegetasi dengan tutupan hutan suaka alam, hutan lindung, hutan rakyat, kebun campuran, ladang, sawah dan pekarangan. Namun demikian berdasarkan *ground check* ke lapangan sudah banyak juga lahan hutan yang berubah menjadi ladang-ladang penduduk walaupun dalam bentuk *spot-spot* yang terpencar (BPDAS Agam Kuantan, 2011).

#### 4.1.6. Lokasi Penelitian

Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai Barat Pulau Sumatera dan berada antara  $0^{\circ}44'00''$  dan  $1^{\circ}08'35''$  Lintang Selatan serta antara  $100^{\circ}05'05''$  dan  $100^{\circ}34'09''$  Bujur Timur. Letak strategis Kota Padang terhadap wilayah administratif lainnya adalah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang Pariaman, sebelah selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok. Menurut PP

Nomor 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 69.496 Ha atau setara 1,65 % dari luas Provinsi Sumatera Barat dengan keliling 165,35 Km<sup>2</sup>. Luas daerah efektif termasuk sungai adalah 205.007 Km<sup>2</sup>, sedangkan luas daerah bukit termasuk sungai adalah 486.209 Km<sup>2</sup>. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 103 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 713.242 jiwa yaitu 16,82 % daripada jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 4,24 juta orang.

Kota Padang mempunyai kondisi topografi yang bervariasi dari dataran hingga perbukitan dengan kemiringan lereng yang bervariasi pula. Lahan dengan kemiringan kurang datar menempati areal seluas 20.223,3 Ha atau 29,1 % dari total luas Kota Padang. Lahan dengan kemiringan lereng curam menempati areal yang luas dan hampir sama dengan lahan yang datar yaitu 18.972,4 Ha atau 27,3 % dari total luas wilayah. Penyebaran jenis tanah di Kota Padang tergolong kepada tipe Podsolik dan Latosol dengan tingkat kesuburan cukup dengan kondisi iklim termasuk tipe iklim A dengan curah hujan rata-rata 2.500 mm/th dengan jumlah hari hujan 200 hari/th.

Tabel 4.2. Penggunaan lahan di Kota Padang.

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Wilayah Hutan :	36.539,50
	a. Hutan Lindung	12.850
	b. Hutan Suak Alam dan Wisata	23.655
	c. Hutan Bakau	34,5
2.	Luas Persawahan :	
	a. Sawah teririgasi	6.595
	b. Sawah tadah hujan	4.173
	c. Pasang surut	291

3.	d. Sawah lainnya	1.588
	Lahan Non Sawah	26.361,50
	a. Rawa-rawa	125
	b. Ladang/Tegalan	1.248
	c. Perkebunan	4.248
	d. Permukiman	3.732
	e. Kolan air tawar	14.301,05
	f. Padang rumput alami	75
	g. Tanah tandus/tanah rusak	1.536
	h. Tanah terlantar (tidak diusahakan)	768
i. Lahan-lain	1.099,18	
Total		69.496

Sumber : Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang, 2012

Berdasarkan analisis spasial digital lahan kritis untuk Kota Padang oleh BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Agam Kuantan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011, dimana hasil analisis menunjukkan tingkat kekritisan lahan di wilayah Kota Padang bervariasi dari tidak kritis hingga sangat kritis. Lahan yang agak kritis menempati areal terluas yaitu 24.254,1 Ha atau 34,9 % dari total luas Kota Padang. Lahan yang sangat kritis menempati luas areal yang terkecil yaitu sebesar 1.598,4 Ha atau 2,3 % dari total luas Kota Padang. Luas dan prosentase setiap kategori lahan kritis di Kota Padang selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 : Luas dan Prosentase Lahan Kritis di Kota Padang.

Kelas Kekritisan Lahan	Luas	
	Ha	%
Tidak Kritis	20.362,3	29,3
Potensial Kritis	17.999,5	25,9
Agak Kritis	24.254,1	34,9
Kritis	5.281,7	7,6
Sangat Kritis	1.598,4	2,3
Tubuh Air	0,0	0,0
Total	69.496	100

Sumber : BPDAS Agam Kuantan Provinsi Sumbar, 2011

Berdasarkan Tabel 4.3, maka di Kota Padang terdapat lahan dalam kondisi yang kritis, seluas 5.281,7 Ha atau sekitar 2,3 % yang berada dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

#### **4.2. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Arau**

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan upaya penanggulangan kerusakan hutan yang dilaksanakan melalui kegiatan RHL yang pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah, kurang mengikuti sertakan masyarakat secara proporsional. Pelaksanaan ini memiliki kelemahan karena tidak menjamin kesinambungan pemeliharaan hutan/lahan yang telah direhabilitasi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pelaksanaan reboisasi perlu di sempurnakan dengan lebih mengutamakan inisiatif masyarakat. Oleh karena itu upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi dan hutan rakyat dalam penyelenggaraannya dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat luas melalui suatu perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang efektif dan efisien. Disamping itu dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi dan hutan rakyat di harapkan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara nyata. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi dan hutan rakyat bertujuan tidak hanya perbaikan fisik DAS (Daerah Aliran Sungai) tetapi sekaligus

perbaikan kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal sekitar daerah aliran sungai tersebut.

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi di Kota Padang mencakup di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Areal penanaman merupakan kecamatan yang terletak di pinggiran Kota Padang yang dilingkari oleh Bukit Barisan yang bertopografi berbukit dan bergelombang. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Kota Padang melalui kegiatan reboisasi hampir tiap tahun diadakan, mulai dari tahun 2002 sampai sekarang.

Untuk kepentingan penelitian, maka pengamatan yang dilakukan dilapangan adalah kegiatan reboisasi dan hutan rakyat yang telah dilaksanakan pada tahun 2007, dimana kegiatannya terdiri dari : 1). Perencanaan seperti pemilihan lokasi yang terdiri dari orientasi/survey lokasi, pengukuran lokasi, dan penyusunan rancangan teknis seperti penyusunan rencana kegiatan, rencana biaya, rencana waktu, serta pembuatan peta yang menggambarkan lokasi kegiatan, 2). Pelaksanaan kegiatan terdiri dari persiapan lahan seperti pemancangan tanda batas, pengukuran ulang lapangan, pembersihan lapangan, pemancangan ajir, pembuatan lubang tanaman, pembuatan piringan, pembuatan gubuk kerja, pembuatan papan pengenal, dan persiapan penanaman terdiri dari penyediaan bibit pada tempat penampungan sementara, penyiapan bahan, peralatan kerja/tenaga kerja, penyiapan pupuk, distribusi bibit, serta pembuatan tanaman yang terdiri dari penanaman, pemupukan, penyulaman bagi tanaman yang mati, 3). Pengawasan

terdiri dari kegiatan evaluasi dan monitoring hasil atau kemajuan kegiatan, membuat laporan mingguan, bulanan, dan tahunan serta tata waktu penyampaian laporan.

Adapun jenis tanaman yang telah ditanam dalam kegiatan reboisasi dan hutan rakyat adalah mahoni, surian untuk tanaman kehutanan, sedangkan jenis tanaman serba guna terdiri dari durian, petai, jengkol dan kemiri. Pembagian komposisi antara tanaman kehutanan dan tanaman serba guna adalah 75 % untuk tanaman kehutanan dan 25 % untuk tanaman serba guna.

Kegiatan perencanaan telah dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan (T-0) yaitu pada tahun 2007. Luas kegiatan reboisasi yang telah dilaksanakan seluas 250 Ha yang terdapat didalam kawasan hutan lindung. Kegiatan dilaksanakan oleh kelompok tani sebanyak 5 (lima) kelompok yang terdapat pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pauh (1 kelompok tani) seluas 50 Ha, Bungus Teluk Kabung (1 kelompok tani) seluas 30 Ha, Koto Tangah (2 kelompok tani) masing-masing kelompok seluas 50 Ha, dan 90 Ha, dan dan Lubuk Kilangan (1 kelompok tani) seluas 30 Ha dengan jumlah anggota kelompok tani masing-masing  $\pm$  40 orang dengan jumlah keseluruhan 200 orang.

Pada tahun 2008 dilakukan kegiatan pemeliharaan Tahun - I yang ditujukan bagi tanaman yang telah mati dengan melakukan penyulaman dengan jenis tanaman yang sama yaitu mahoni, surian, durian, petai, jengkol, dan kemiri. Kemudian pada tahun 2009 dilaksanakan pemeliharaan Tahun - II yang

kegiatannya hanya pembersihan fisik lapangan seperti menyingi tanaman pokok dari tanaman pengganggu.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan pada tahun 2007 sampai pada tahap pelaksanaan hingga berlanjut pada tahun 2012. Pengawasan bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi hasil atau kemajuan yang telah dicapai dari masing-masing tahapan kegiatan dengan tujuan agar dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan bila terdapat kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **4.3. Profil Responden Peserta Kegiatan RHL**

Penelitian Partisipasi Masyarakat pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang dilakukan pada sejumlah responden sebanyak 65 orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan reboisasi dan hutan rakyat. Data nama-nama responden dapat dilihat pada Lampiran 4. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan adanya variasi umur responden. Responden yang termuda berumur 18 tahun dan yang paling tua berumur 77 tahun. Mayoritas responden berumur lebih dari 30 tahun dan yang paling dominan berumur antara 21 sampai dengan 30 tahun dengan jumlah sebanyak 25 dan 35 orang atau 38,46 % dan 53,85 %. Hal ini menunjukkan bahwa peserta kegiatan reboisasi terdiri dari tenaga kerja yang masih berusia muda dan produktif. Usia muda dan produktif sangat dibutuhkan sekali dalam kegiatan fisik lapangan karena topografi lapangan untuk penanaman termasuk sedang dan berat. Data umur

responden yang diteliti adalah umur kepala keluarga sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 : Umur responden peserta kegiatan RHL di Kota Padang.

No.	Umur (Tahun)	Frekuensi	Prosentase
1.	≤ 20	5	7,69
2.	21 – 29	25	38,46
3.	≥ 30	35	53,85

Sumber : Data primer hasil penelitian 2012

Kemudian tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang memberikan pengaruh terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Berdasarkan tingkat pendidikan yang pernah diikuti responden dalam penelitian ini dapat di lihat pada Tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5: Pendidikan responden peserta kegiatan RHL Kota Padang

No.	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1.	SD	39	60,00
2.	SMP	13	20,00
3.	SMA	12	18,46
4.	Sarjana	1	1,54
5.	Lainnya	0	0

Sumber : Data primer hasil penelitian 2012

Tabel 4.5, menunjukkan bahwa responden yang pendidikan SD menempati urutan yang tertinggi yaitu 39 orang atau 60,00 % dan yang pendidikan SMP sampai SMA sebanyak 25 orang atau 38,46 %. Dengan demikian mayoritas responden memiliki pendidikan hanya sampai SD, hal ini memungkinkan terjadi bila melihat tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar penelitian masuk dalam taraf ekonomi lemah, ditandai dengan banyaknya anak-anak yang masih belum

tersentuh dalam kelompok wajib belajar sembilan tahun, bentuk rumah yang masih non permanen, dan penghasilan masih di bawah Rp. 700.000, dengan pekerjaan umumnya petani lepas atau penggarap sebagaimana di tunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 : Pekerjaan responden peserta kegiatan RHL di Kota Padang

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase
1.	Petani	36	55,38
2.	Buruh	27	41,54
3.	Lainnya	2	3,08

Sumber : Data primer hasil penelitian 2012

Pada tabel 4.6, dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai petani sebesar 55,38 %, dengan status sebagai petani penggarap dan hanya sebagian kecil saja yang memiliki lahan untuk diolah sendiri. Dengan pekerjaan sebagai petani, maka kegiatan reboisasi dan hutan rakyat akan banyak terbantu dalam penanaman karena responden sudah berpengalaman dalam bercocok tanam di ladang atau dikebun.

#### **4.4. Tahapan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan RHL**

##### **4.4.1. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap partisipasi masyarakat yang merupakan variabel terikat (dependent) pada tahap perencanaan sebagai mana di sajikan pada Tabel 4.7. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat secara aktual dalam tahap perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4.7. Pada Tabel 4.7, dapat diketahui bahwa dari keseluruhan rangkaian kegiatan

perencanaan, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perencanaan hanya sebesar 17.43 %, jauh lebih kecil dari yang tidak terlibat hampir mencapai 82.57 %. Hal ini menunjukkan bahwa antara sikap (penilaian) masyarakat terhadap kegiatan perencanaan tidak konsisten dengan keterlibatannya secara aktif dalam kegiatan perencanaan. Hasil wawancara dilapangan dengan petugas pelaksana lapangan, menemukan beberapa penyebab sedikitnya keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi pada tahap perencanaan yaitu para pelaksana kegiatan belum melaksanakan secara optimal kegiatan perencanaan yang bersifat partisipatif sehingga keterlibatan masyarakat sangat sedikit dalam tahap perencanaan. Hal ini disebabkan, kegiatan perencanaan sebagian besar dari keseluruhan rangkaian kegiatan dilakukan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.

Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah masih belum adanya keterbukaan secara transparan antara aparat dengan masyarakat dalam pengelolaan keuangan, ada anggapan bahwa masyarakat masih belum paham dalam perencanaan kegiatan RHL, serta waktu pelaksanaan yang sangat singkat dan terbatas maka tidak memungkinkan melibat masyarakat secara penuh karena pendanaan baru terealisasi pertengahan tahun. Porsi partisipasi bagi masyarakat peserta kegiatan dalam tahap perencanaan tentu sangat kecil sehingga dengan sendirinya masyarakat yang terlibat juga sedikit. Masyarakat hanya terlibat dalam kegiatan orientasi/survey lokasi, dan pengukuran lokasi. Kegiatan itupun lebih banyak bersifat memberikan semacam informasi pada tim perencanaan

tentang lokasi, jadwal atau waktu penanaman serta menunjukkan batas-batas lahan yang akan di tanam.

**Tabel 4.7. : Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan RHL pada tahap perencanaan**

No.	Pernyataan	Keterlibatan/Perilaku Responden			
		Terlibat	%	Tidak terlibat	%
1	Petani terlibat dalam penentuan dan usulan lokasi lahan kritis yang layak untuk dijadikan kegiatan reboisasi.	18	27.69	47	72.31
2	Petani ikut serta dalam pengukuran lokasi dgn tim perencanaan dari dinas kehutanan & pertanian dlm rangka perencanaan kegiatan rhl.	10	15.38	55	84.62
3	Dalam penyusunan rantek, petani terlibat dlm penyusunan rencana kegiatan reboisasi.	10	15.38	55	84.62
4	Dalam penyusunan rantek, petani terlibat dlm menyusun rincian rencana biaya.	10	15.38	55	84.62
5	Keterlibatan petani dalam penyusunan rencana waktu dalam rangka penyusunan rantek.	12	18.46	53	81.54
6	Petani terlibat dalam pembuatan peta lokasi sebagai pedoman dalam kegiatan reboisasi di lapangan.	8	12.31	57	87.69
<b>Keterlibatan Responden</b>		<b>11.33</b>	<b>17.43</b>	<b>53.67</b>	<b>82.57</b>

Sumber data : Tabulasi data primer responden (n = 65)  
Tahun 2012

Kemudian sosialisasi kegiatan perencanaan yang dilakukan belum optimal, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan perencanaan. Begitu juga dengan sosialisai internal kelompok tani belum optimal. Proses perencanaan hanya diketahui oleh pengurus kelompok saja, dan hampir

sebagian besar masyarakat tidak mengetahui proses perencanaan, maka wajar didapatkan nilai 82,57 % dimana masyarakat tidak terlibat dalam proses perencanaan. Selanjutnya masih rendah sumber daya masyarakat sehingga merasa tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dimana penyebabnya adalah masih kurang pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan perencanaan yang partisipatif oleh dinas. Terakhir kegiatan perencanaan hanya cukup diwakili oleh ketua kelompok, terutama untuk hubungan atau komunikasi dengan aparat dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan.

Untuk mengetahui lebih dalam penyebab sedikitnya masyarakat terlibat dalam kegiatan perencanaan, didapatkan hasil wawancara dari aparat Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang yaitu Kepala Bidang Kehutanan, dimana penyebabnya adalah keterbatasan waktu dan biaya, menjadi halangan dan kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan yang dilakukan dalam kegiatan reboisasi dan hutan rakyat dilaksanakan dalam tahun yang bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan, seharusnya perencanaan dilaksanakan satu tahun sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai ( $T - 1$ ). Dalam menyikapi hal ini, Kepala Bidang Kehutanan tidak ada pilihan selain harus melaksanakannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan menyadari bahwa hal ini disebabkan oleh sistem atau kebijakan dari pusat (Kementerian Kehutanan).

Rencana kegiatan yang biasa disebut dengan Rencana Definitif kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) seharusnya dibuat

oleh anggota kelompok tani tetapi justru dibuat oleh petugas pelaksana lapangan sehingga membuat masyarakat menjadi tidak berpartisipasi karena masyarakat sudah terima jadi dari hasil rencana kegiatan yang telah dibuatkan oleh petugas lapangan.

Selanjutnya dalam pembuatan rancangan kegiatan yang sangat berguna sebagai petunjuk pelaksana di lapangan, justru dibuat pada saat pelaksanaan kegiatan, seharusnya dibuat satu tahun sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai. Begitu juga dengan keinginan masyarakat untuk pemilihan jenis-jenis tanaman yang dikehendaki oleh masyarakat tidak selalu dapat dipenuhi karena sudah ada ketentuan komposisi antara tanaman kehutanan dengan tanaman serba guna dengan perbandingan 75 : 25. Sebagai contoh, masyarakat meminta tanaman karet dalam jumlah yang besar, tentu hal ini tidak dapat dipenuhi karena sudah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Padahal semestinya masyarakat harus terlibat secara keseluruhan atau mengikuti semua kegiatan perencanaan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang pengurus kelompok yaitu Yunus (30 Tahun) yang mengatakan bahwa masyarakat peserta kegiatan reboisasi dan hutan rakyat belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan perencanaan hanya sebagian saja dalam kegiatan orientasi/survey lokasi, dan pengukuran lokasi dan itupun tidak masuk sebagai anggota tim perencanaan.

Dapat dikatakan bahwa perencanaan yang diterapkan masih belum *bottom up* tetapi masih bersifat *top down* padahal perlu diupayakan agar partisipasi

masyarakat tidak hanya sekadar berbentuk keterlibatan semu yang dikategorikan sebagai *manipulation* dimana masyarakat sebenarnya tidak berpartisipasi, melainkan harus mencapai kondisi dimana mereka memiliki wewenang yang cukup misalnya pada tahapan yang dikategorikan sebagai *partnership*, *delegated power* atau bahkan *citizen control* (Mitchell, 1997).

Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan sangat penting dimana masyarakat bukan sebagai objek dari pembangunan tetapi sebagai subjek dari pembangunan karena adanya unsur pendekatan *bottom up* akan memperoleh hasil yang lebih baik karena ada unsur partisipasi masyarakat (Sudarmadji, 2011).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan masih kurang, padahal partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan berkelanjutan, terutama untuk mengakomodir persepsi, pola pikir dan sikap sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terjamin (Syairazi, 2006).

#### 4.4.2. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dimana partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan sebagaimana yang di sajikan pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.8. : Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan reboisasi pada tahap pelaksanaan**

No.	Pernyataan	Keterlibatan/Perilaku Responden			
		Terlibat	%	Tidak terlibat	%
1	Persiapan lahan dgn keterlibatan petani dlm pema-ncangan tanda batas yang akan dijadikan areal penanaman reboisasi	60	92.31	5	7.69

2	Sebelum kegiatan penanaman dimulai, petani terlibat dlm pengukuran ulangan lapangan.	60	92.31	5	7.69
3	Petani terlibat dlm pembersihan lapangan mulai dari penebasan semak belukar, tanaman liar, dan pembuangan tunggak kayu.	60	92.31	5	7.69
4	Keterlibatan petani dalam pembuatan arah larikan sebelum bibit di tanam.	58	89.23	7	10.77
5	Pemancanagn ajir dgn keterlibatan petani sebagai peserta kegiatan reboisasi.	57	87.69	8	12.31
6	Sebelum bibit dibawa ke lapangan terlebih dahulu petani terlibat dalam membuat lubang tanaman.	62	95.38	3	4.62
7	Petani terlibat dalam pembuatan piringan tanaman yang merupakan rangkaian kegiatan penanaman.	61	93.85	4	6.15
8	Petani terlibat dlm membuat gubuk kerja sebagai tempat menyimpan peralatan kegiatan reboisasi di lapangan.	46	70.77	19	29.23
9	Pembuatan papan pengenal sebagai tanda pengenal kegiatan dilapangan perlu dibuat dgn keterlibatan petani peserta kegiatan reboisasi.	39	60.00	26	40.00
10	Dalam persiapan penanaman, petani terlibat dlm menentukan tempat penyediaan bibit sebagai tempat penampungan sementara.	50	76.92	15	23.08
11	Sebelum penanaman dimulai, petani terlibat dlm penyiapan bahan/peralatan seperti perlengkapan kerja (sepatu boot, helm, cangkul, arit, dll), penyiapan pupuk.	56	86.15	13	13.85
12	Petani terlibat dlm pen-distribusian bibit mulai dari tempat penampungan sementara sampai bibit siap untuk ditanam.	58	89.23	7	10.77
13	Petani terlibat dalam penanaman kegiatan reboisasi yang merupakan inti dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.	62	95.38	3	4.62
14	Pemupukan dilakukan dengan keterlibatan petani	64	98.46	1	1.54

	pada seluruh areal/lokasi penanaman.				
15	Bagi tanaman yang mati perlu diadakan penyulaman dengan keterlibatan petani sebagai peserta kelompok tani.	62	95.38	3	4.62
	<b>Rata-rata keterlibatan responden</b>	<b>57</b>	<b>87.69</b>	<b>8.27</b>	<b>12.31</b>

Sumber data : Tabulasi data primer responden (n = 65)  
Tahun 2012

Dari Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa masyarakat terlibat untuk berpartisipasi pada tahap pelaksanaan hampir mencapai 87.69 %. Nilai ini cukup besar dan dapat dijadikan sebagai indikator bahwa antara sikap/penilaian masyarakat terhadap kegiatan RHL sangat konsisten dengan keterlibatannya secara aktif dalam kegiatan pelaksanaan RHL.

Besarnya keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan RHL disebabkan kegiatan RHL dalam pelaksanaan utamanya adalah masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan RHL. Pelaku inti program rehabilitasi hutan dan lahan adalah masyarakat, dan bukan pemerintah seperti yang sudah terjadi selama ini. Dalam jangka panjang, point masukan ini akan menjadikan masyarakat merasa berkepentingan untuk memelihara keberlanjutan program rehabilitasi hutan dan lahan. Kurangnya partisipasi masyarakat akibat praktek pengelolaan hutan di masa yang lalu kurang memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan yang ada disekitarnya. Akibatnya sebagian masyarakat cenderung apatis dan kurang

peduli terhadap upaya-upaya yang bertujuan untuk merehabilitir dan menjaga eksistensi hutan di wilayahnya (Irianto, 2004).

Hasil wawancara dengan salah seorang pengurus kelompok tani yang mengatakan bahwa seluruh anggota kelompok tani dalam kegiatan RHL terlibat secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan RHL mulai dari persiapan lahan, pengangkutan bibit, membuat lubang, menanam, memupuk dan menyiangi.

Hal ini sesuai apa yang di jelaskan oleh salah seorang petugas lapangan kecamatan yang mengatakan bahwa anggota kelompok tani terlibat dalam setiap pelaksanaan kegiatan RHL secara keseluruhan di lapangan dengan mengikuti tahapan teknis kegiatan yang telah diberikan oleh aparat kehutanan.

Keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi pada tahap pelaksanaan dalam kegiatan RHL tidak terlepas dari adanya sosialisasi pada awal kegiatan yang disampaikan oleh aparat dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan dimana pentingnya kegiatan RHL dalam mengatasi kerusakan lingkungan terutama dari bahaya longsor dan banjir, disamping adanya manfaat lain yaitu upah yang diterima. Keterlibatan petani secara penuh dalam kegiatan pelaksanaan RHL dapat dikatakan karena adanya dorongan upah yang menarik, bantuan bibit secara cuma-cuma terutama jenis tanaman serba guna seperti durian, petai, manggis, dan jengkol sebagaimana yang disampaikan oleh nara sumber dari kelurahan/kecamatan bahwa yang mendorong masyarakat untuk mau terlibat dalam pelaksanaan kegiatan RHL secara keseluruhan adalah adanya upah yang menarik, dan kegiatan RHL rutin tiap tahun di laksanakan di sekitar tempat tinggal

petani, serta umumnya petani tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau bekerja sebagai petani musiman, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan sumber pendapatan tambahan disamping pendapatan utamanya dari bertani/kebun/ladang.

Salah satu cara agar masyarakat terlibat dalam kegiatan pelaksanaan RHL bukan disebabkan oleh adanya upah adalah meningkatkan SDM masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan dalam bidang RHL yang dilaksanakan secara kontiniu dengan melibatkan semua unsur mulai dari tingkat kelurahan sampai kecamatan. Adapun tujuannya adalah untuk mengubah cara berpikir (*mindset*) dari orientasi upah menjadi suatu kebutuhan dalam bentuk gerakan moral gemar menanam dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kualitas lingkungan.

Adanya manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat dan dapat memenuhi kepentingan hidup masyarakat setempat akan mendorong tingginya keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi pada tahap pelaksanaan kegiatan RHL. Masyarakat tergerak untuk berpartisipasi, apabila partisipasi itu memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari adanya partisipasi akan dapat memenuhi kepentingan hidup masyarakat setempat (Ndraha, 2010).

#### **4.4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pengawasan**

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Pada Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa masyarakat terlibat untuk berpartisipasi pada tahap pengawasan hanya 27.69 %. Nilai ini cukup kecil bila dibandingkan dengan yang tidak terlibat mencapai 72.31 %. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam tahap pengawasan ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan aparat dari dinas yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan pengawasan. Di samping itu pengawasan yang dilakukan oleh berbagai instansi yang terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil kemajuan kegiatan, kurang direspon masyarakat dengan baik karena masyarakat merasa takut apabila kegiatan yang telah dilakukan dianggap kurang berhasil. Hal yang sama juga dialami oleh pelaksana lapangan atau aparat dari dinas, dimana adanya ketakutan yang berlebihan bila turun tim monitoring dan evaluasi untuk menilai hasil kegiatan yang telah dicapai akan dianggap gagal. Karena ada anggapan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya untuk mencari kelemahan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 4.9. : Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan RHL pada tahap pengawasan.**

No.	Pernyataan	Keterlibatan/Perilaku Responden			
		Terlibat	%	Tidak terlibat	%
1	Keterlibatan petani dalam menilai kemajuan atau hasil kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan bersama-sama dengan tim monitoring dan evaluasi (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Padang, Dinas Kehutanan Provinsi, BPDAS).	18	27.69	47	72.31
2	Petani terlibat dalam pembuatan laporan hasil/ke	17	26.15	48	73.85

	majuan kegiatan reboisasi dilapangan secara periodik (lap. Mingguan, bulanan) dgn waktu/jdwl yg telah ditetapkan oleh Dinas Perhut Kota Padang				
3	Keterlibatan petani dalam penyampaian laporan kegiatan reboisasi dari kelompok tani ke aparat kehutanan dapat disampaikan kapan saja	19	29.23	46	70.77
	<b>Rata-rata keterlibatan responden</b>	<b>18</b>	<b>27.69</b>	<b>55</b>	<b>72.31</b>

Sumber data : Tabulasi data primer responden (n = 65)  
Tahun 2012

Selama ini pengawasan dalam kegiatan RHL hanya dilaksanakan oleh pengurus kelompok saja karena kelompok tani terutama ketua kelompok di bebani tanggung jawab untuk membuat laporan hasil/kemajuan kegiatan kepada petugas atau aparat Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan. Keterlibatan ini hanya pada pengurus kelompok saja dan bukan seluruh anggota karena kesulitan dalam menggumpulkan seluruh anggota. Idealnya pengawasan harus dilaksanakan secara penuh mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Dengan tujuan agar ada kontrol dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga bila ada permasalahan yang muncul akan dapat diambil tindakan untuk penyempurnaannya.

Hal ini disebabkan karena pengawasan yang diberikan oleh aparat penyuluh terhadap kelompok tani hanya dilaksanakan bila di rasa perlu seperti ada kunjungan tim dari Kementerian Kehutanan (Jakarta), Dinas Kehutanan Provinsi, dimana sebelum tim turun ke lapangan pihak aparat baru melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan padahal semestinya aparat harus kontiniu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh

kelompok tani sehingga dengan sendirinya kelompok tani akan terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pengawasan secara keseluruhan terutama dalam kegiatan pertemuan-pertemuan dengan aparat penyuluh dalam rangka monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus kelompok tani yang mengatakan bahwa pembinaan kurang maksimal dari aparat kehutanan terutama dalam teknik penyusunan atau pembuatan laporan termasuk pengawasan pengontrolan kemajuan fisik kegiatan secara periodik dari petugas. Laporan kemajuan dibuat bila dibutuhkan misalnya pada awal bulan atau akhir tahun untuk penyusunan laporan tahunan dinas.

Pengawasan ini sangat menentukan sekali bagi keberhasilan suatu kegiatan terutama keberhasilan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sehingga bila terjadi permasalahan atau perubahan dalam pelaksanaan baik dari awal maupun tengah kegiatan akan dapat segera diambil tindakan untuk penyempurnaannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Syairazi (2006) bahwa pentingnya kegiatan pengawasan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan dimana pengawasan dan evaluasi merupakan alat untuk belajar dari pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan untuk kemudian melakukan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kegiatan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi sangat penting dalam menilai hasil atau kemajuan yang telah dicapai dari suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai umpan balik gagal atau berhasilnya kegiatan tersebut.

#### 4.5. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang

Untuk menjawab rumusan masalah, pertanyaan peneliti dan menguji hipotesa maka dilakukan uji statistik berdasarkan data hasil jawaban responden (65 responden).

Metode analisis jalur digunakan untuk dapat mencari hubungan kausal atau pengaruh diantara variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu partisipasi masyarakat pada program rehabilitasi hutan dan lahan yang disimbolkan dengan Y. Sedangkan variabel independen yaitu faktor internal dan faktor eksternal disimbolkan dengan X yang terdiri dari 5 variabel yaitu motivasi (X1), persepsi (X2), penyuluhan (X3), lama tinggal (X4), dan tingkat pendapatan (X5). Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan perhitungan komputerisasi didapat persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y = 0,043 + 0,476 (X1) + 0,332 (X2) + 0,065 (X3) + 0,0793 (X4) + 0,343 (X5) + \Sigma$$

Untuk mengetahui hubungan antara semua variabel bebas dengan variabel terikat, dapat dilihat dari koefisien korelasi (R) yang nilainya 0,923. Nilai R ini setara dengan 92,3 %, menunjukkan bahwa hubungan (*korelasi*) antara tingkat partisipasi dengan variabel bebas sangat kuat, karena koefisien mempunyai hubungan positif yang mendekati angka 1. Nilai koefisien determinasi X terhadap Y sebesar 0,887 atau 88,7 % . Karena variabel bebas lebih dari dua maka

digunakan R Square yang nilainya 0,887 atau setara dengan 88,7 %, yang berarti sumbangan motivasi, persepsi, penyuluhan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah 88,7 % itu berarti 11,3 % ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar variabel motivasi, persepsi, penyuluhan, lama tinggal dan tingkat pendapatan (X1, X2, X3, X4 dan X5), yang mungkin dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabiliatsi Hutan dan Lahan (Y).

Analisis lebih lanjut dengan uji F di peroleh F hitung sebesar 48,249 dengan probabilitas 0,000. Bila F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan derajat bebas (5) (59) pada selang kepercayaan 95 % yang nilainya 2,371 dan  $H_0$  ditolak, maka  $F_{hit} > F_{tab}$  yang menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh semua variabel bebas (motivasi, persepsi, penyuluhan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan) secara bersama-sama terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sangat nyata (*significant*). Hasil ini dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat partisipasi masyarakat dari faktor-faktor yang diteliti.

Kemudian dilakukan uji bagi masing-masing koefisien jalur dengan uji t – student untuk menguji keberartiannya dari hasil perhitungan SPSS untuk analisis jalur, koefisien yang digunakan adalah koefisien beta atau koefisien standar (*standardized coefficients*). Kriteria penolakan  $H_0$ , jika t hitung lebih besar dari t tabel sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 : Hasil pengujian koefisien jalur t – student

No	Koefisien Jalur	t hitung	t tabel	Keterangan
1	0,521 (X1)	3.987	1,671	H <sub>0</sub> ditolak
2	0,256 (X2)	2.678	1,671	H <sub>0</sub> ditolak
3	0,069 (X3)	2.513	1,671	H <sub>0</sub> ditolak
4	0,073 (X4)	2.298	1,671	H <sub>0</sub> ditolak
5	0,277 (X5)	2.219	1,671	H <sub>0</sub> ditolak

Untuk melihat faktor yang paling berpengaruh (dominan) terhadap partisipasi masyarakat dilakukan analisis dengan uji t. Pengaruh dari masing-masing variabel bebas (motivasi, persepsi, penyuluhan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan) terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan lebih rinci diuraikan sebagai berikut :

#### 4.5.1. Pengaruh Motivasi (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat.

Motivasi dimaksudkan sebagai dorongan yang membuat responden ikut serta dalam program RHL. Motivasi masyarakat dalam RHL dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11. Motivasi masyarakat terhadap kegiatan RHL

Motivasi	Anggota Kelompok Tani	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1. Karena ikut teman	0	0
2. Ada upah menarik	65	100
3. Ingin terlibat untuk menjaga lingkungan	0	0
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>100</b>

Pengaruh yang terbesar terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah faktor internal pada variabel motivasi (X1) sebesar 0.521 dan berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 95 % dimana nilai t hitung adalah  $3.987 > t_{\text{tabel}} (59;0,05)$  adalah 1,671. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa anggota kelompok tani yang motivasinya karena ada upah menarik sebanyak 100 %.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi dengan tingkat partisipasi masyarakat berupa hubungan positif dengan angka koefisien regresi sebesar 0,476. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL. Artinya faktor internal dalam hal ini motivasi (X1) secara parsial berpengaruh positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.

Bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Kusworo (2005) terhadap penelitian ini pada variabel motivasi juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel motivasi terhadap partisipasi masyarakat. Adanya pengaruh yang signifikan tersebut karena termotivasi adanya upah yang menarik dimana terdapat dua keuntungan dari upah yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan RHL yaitu jumlah yang diberikan cukup besar bila dibandingkan dengan upah sebagai buruh tani atau kuli bangunan dan diterima setiap akhir minggu (biasanya masyarakat menerima setiap hari Sabtu).

Melihat dari kehidupan masyarakat disekitar penelitian masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu dengan indikator banyak dari responden yang

berpendidikan sampai SD bahkan ada yang tidak tamat, kondisi rumah masih semi permanen, pendapatan rata-rata per bulan masih dibawah standar 600.000 – 800.000 dengan anggota keluarga berjumlah 4 – 5 orang. Umumnya masyarakat bekerja sebagai petani penggarap yang mendapatkan upah sangat kecil dan kadang-kadang tidak menerima upah karena sudah dipotong dari pinjaman sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari.

Dengan adanya kegiatan RHL ini, secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan mereka dalam memenuhi kehidupan sehari-hari karena upah yang mereka terima setiap akhir minggu cukup signifikan dalam menutupi kebutuhan dapur. Rata-rata mereka mendapatkan upah per minggu Rp. 300.000 – Rp. 350.000 secara rutin tanpa adanya pemotongan di sana sini. Masyarakat dapat secara langsung merasakan manfaatnya dari adanya kegiatan reboisasi ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ndraha (2010) bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika partisipasi itu memberikan manfaat langsung masyarakat yang bersangkutan dan manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.

Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi juga disediakan bibit tanaman MPTS atau tanaman serba guna seperti petai, jengkol, manggis, durian, dan kemiri. Bibit ini diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma tanpa dipungut bayaran. Disamping menanam tanaman pokok untuk RHL (mahoni, meranti, sungkai dan surian), masyarakat juga dapat menanam tanaman serba guna. Dengan tujuan, jika seandainya kegiatan RHL tidak ada, maka masyarakat

tidak kehilangan penghasilan dari upah yang mereka terima tetapi masih mendapatkan penghasilan dari tanaman serba guna (petai, jengkol, manggis, durian, dan kemiri) sehingga ada kontinuitas dari penghasilan yang diperoleh.

#### 4.5.2. Pengaruh Persepsi (X2) Terhadap Partisipasi Masyarakat (Y).

Persepsi adalah pemahaman atau pendapat masyarakat yang menjadi responden terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan RHL dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan RHL

Persepsi	Anggota Kelompok Tani	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1. Sangat tidak setuju	0	0
2. Tidak setuju	10	15,38
3. Ragu-ragu	0	0
4. Setuju	0	0
5. Sangat setuju	55	84,62
Total	65	100

Pengaruh partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada variabel persepsi (X2) sebesar 0.256 dan berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 95 % dimana nilai  $t$  hitung adalah  $2,678 > t_{\text{tabel}} (59;0,05)$  adalah 1,671. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa anggota kelompok tani yang mempunyai persepsi sangat setuju atau pemahaman positif terhadap kegiatan RHL sebanyak 84,62 % dan tidak setuju atau pemahaman negatif sebesar 15,38 %.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi dengan tingkat partisipasi masyarakat berupa hubungan positif dengan angka koefisien regresi

sebesar 0,332. Begitu juga dengan  $t$  hitung pada variabel  $X_2$  sebesar 2.678 lebih besar dari  $t$  tabel sebesar 1,671, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel persepsi terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL, dimana secara parsial berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Sattar (2008) dalam penelitiannya tentang persepsi masyarakat pedesaan terhadap usaha konservasi sumber daya alam dan lingkungan di DAS Bila Wanae Sulawesi Selatan. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan RHL merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan RHL. Persepsi masyarakat yang rendah akan menghambat pelaksanaan kegiatan RHL sedangkan persepsi masyarakat yang tinggi merupakan dukungan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan RHL, masyarakat yang mempunyai persepsi yang tinggi akan melahirkan dukungan dan partisipasi terhadap kegiatan RHL. Persepsi adalah proses dimana seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra-indra yang dimilikinya atau pengetahuan tentang lingkungannya yang diperoleh melalui interpretasi data indra.

Persepsi sebagai proses kognitif yang bisa terjadi pada setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya yang dapat diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan. Dalam konteks persepsi terhadap pengelolaan lingkungan, individu memberikan reaksi (respon) yang digunakan

sebagai indikator terhadap keikutsertaan masyarakat setempat atau tidak adanya informasi tentang pengelolaan lingkungan (Erwina, 2009).

#### 4.5.3. Pengaruh Penyuluhan (X3) Terhadap Partisipasi Masyarakat (Y).

Penyuluhan adalah aktivitas penyampaian informasi mengenai RHL yang ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan kemauan untuk terlibat dalam kegiatan RHL. Kehadiran anggota kelompok tani dalam kegiatan penyuluhan pada kegiatan RHL dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13. Jumlah responden berdasarkan kehadiran pada penyuluhan

Kehadiran dalam penyuluhan (per tahun)	Anggota Kelompok Tani	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1. Tidak hadir	2	3,08
2. Hadir 1 kali/tahun	11	16,92
3. Hadir 2 kali/tahun	24	36,92
4. Hadir 3 kali/tahun	28	43,08
Total	65	100

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa anggota kelompok tani yang tidak hadir sama sekali hanya 3,08 %, yang hadir 1 (satu) kali per tahun sebanyak 16,92 %, hadir 2 (dua) kali per tahun sebanyak 36,92 %, dan yang hadir 3 (tiga) kali per tahun sebanyak 43,08 %.

Pengaruh variabel penyuluhan (X3) terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 0.069 dan berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 95 % dimana nilai  $t$  hitung adalah  $2,513 > t_{tabel(59;0,05)}$  adalah 1,671.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara penyuluhan dengan tingkat partisipasi masyarakat berupa hubungan positif dengan angka koefisien regresi sebesar 0,065. Begitu juga dengan t hitung pada variabel X3 sebesar 2.513 lebih besar dari t tabel sebesar 1,671, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel penyuluhan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL, dimana secara parsial berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL. Hubungan positif antara penyuluhan dengan partisipasi masyarakat ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Kusworo dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). Penyuluhan merupakan sarana transfer pengetahuan dari penyuluh kepada masyarakat. Penyuluhan membuat masyarakat mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan, dan dapat meningkatkan peransertanya dalam kegiatan RHL.

Soesilowati (2010), menyatakan bahwa dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan termasuk kegiatan konservasi didalamnya masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai berbagai aspek pengelolaan hutan secara berangsur-angsur melalui pelatihan. Pelatihan atau penyuluhan yang diberikan secara berkala dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam program pembangunan.

#### **4.5.4. Pengaruh Lama Tinggal (X4) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)**

Lama tinggal adalah lamanya keberadaan anggota masyarakat untuk berdomisili pada satu tempat yang sangat menentukan dalam pelaksanaan

kegiatan. Penduduk yang tinggal disekitar kawasan hutan yang merupakan objek lokasi penelitian terdiri dari penduduk asli dan pendatang yang sampai saat ini terus terjadi mobilisasi penduduk, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14. Jumlah responden berdasarkan lama tinggal.

No.	Lama Tinggal (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0 – 20	20	30,77
2.	21 - 29	8	12,31
3.	$\geq 30$	37	56,92
	Jumlah	65	100

Sumber : Data primer hasil penelitian 2012

Pengaruh partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada variabel lama tinggal (X4) sebesar 0.073 dan berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 95 % dimana nilai t hitung adalah  $2,298 > t_{\text{tabel}} (59;0,05)$  adalah 1,671.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara lama tinggal dengan tingkat partisipasi masyarakat berupa hubungan positif dengan angka koefisien regresi sebesar 0,0793. Begitu juga dengan t hitung pada variabel X4 sebesar 2.298 lebih besar dari t tabel sebesar 1,671, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel lama tinggal terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL, dimana secara parsial berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.

Dari Tabel 4.14, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden termasuk penduduk asli yang telah lama bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan lebih dari 30 tahun yakni sebesar 56,92 % dan yang lama tinggal 21 – 29 tahun sebesar 12,31 %, sedangkan yang lama tinggal 0 – 20 tahun sebesar 30,77 %.

Penduduk asli yang telah bermukim sejak lahir bahkan ada yang sejak leluhurnya (> 30 Tahun), sehingga dapat diartikan bahwa mereka telah menyatu dengan lingkungan tempat tinggal mereka yang pada akhirnya akan mendorong timbulnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungannya terutama pada program pemerintah yaitu RHL.

Timbulnya keinginan masyarakat sekitar kawasan hutan terhadap kegiatan RHL dipengaruhi oleh pengalaman yang terjadi disekeliling mereka seperti adanya bahaya longsor, erosi, dan banjir bandang seperti terjadi pada bulan Juli 2012 di Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh, yang banyak menimbulkan kerugian materi dengan hancurnya infrastruktur seperti irigasi, PDAM, jaringan listrik dan kerugian disektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa lamanya tinggal sangat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan RHL. Selanjutnya Irawan (2010) melaporkan hasil penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove menyatakan bahwa lamanya tinggal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang. Seseorang yang menempati atau bermukim lebih lama bahkan sudah turun

temurun pada suatu tempat menunjukkan tingkat kepedulian yang sangat tinggi dalam menjaga, memelihara dan mempertahankan keberadaannya. Masyarakat sudah menyatu dan sudah paham bagaimana memperlakukan alam sekitarnya, terutama dalam pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu yang tidak melebihi dari kebutuhan dan tetap mempertahankan lingkungan terjaga dengan baik.

#### 4.5.5. Pengaruh Tingkat Pendapatan (X5) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Tingkat pendapatan adalah rata-rata pendapatan keluarga yang dihasilkan oleh kepala keluarga per-bulan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tingkat pendapatan responden dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut :

Tabel 4.15. Jumlah responden berdasarkan tingkat pendapatan.

No.	Tingkat Pendapatan (Rp/Bln)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	≤ 500.000	26	40
2.	500.000 – 1.000.000	26	40
3.	> 1.000.000	13	20
	Jumlah	65	100

Sumber : Data primer hasil penelitian 2012

Pengaruh variabel tingkat pendapatan (X5) terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 0.277 dan berpengaruh secara

signifikan pada taraf kepercayaan 95 % dimana nilai  $t$  hitung adalah  $2,219 > t_{tabel}$  ( $59;0,05$ ) adalah 1,671.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat partisipasi masyarakat berupa hubungan positif dengan angka koefisien regresi sebesar 0,343. Begitu juga dengan  $t$  hitung pada variabel X5 sebesar 2.219 lebih besar dari  $t$  tabel sebesar 1,671, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel tingkat pendapatan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL, dimana secara parsial berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.

Dari Tabel 4.15, dapat dilihat bahwa pendapatan anggota kelompok yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 500.000 dan antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 perbulan mempunyai persentase sama banyak yaitu sebesar 26 % dan selebihnya berpendapatan sebesar diatas Rp. 1.000.000 per bulan sebesar 13 %. Pada kisaran pendapatan Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 perbulan keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar secara normal.

Sehingga dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL. Apabila masyarakat sudah mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung untuk lebih memfokuskan seluruh perhatian dan upayanya kepada usaha/pekerjaan pokok yang dipandang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan terlibat pada kegiatan RHL. Dan sebaliknya seseorang dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah akan cenderung mencari tambahan penghasilan dengan usaha lain

tanpa memandang suatu jenis pekerjaan dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan responden masih rendah, sehingga responden cenderung mencari tambahan penghasilan dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan RHL, yang akhirnya dapat meningkatkan penghasilan yang mereka terima. Dari hasil wawancara lapangan, umumnya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan RHL adalah mereka yang mempunyai tingkat pendapatan yang masih rendah sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.15. Bagi mereka yang berpenghasilan diatas Rp. 1.000.000 per bulan, relatif lebih banyak ditemukan bekerja diluar sektor kegiatan RHL.

Muhammad Rizal (2005), menyatakan dalam menilai tingkat pendapatan dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan pengembangan diri, dalam hal ini keluarga dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu : (1). Keluarga miskin yakni keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara normal. (2). Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar secara normal dan (3). Keluarga sejahtera yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan keluarga baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan pengembangan diri (kemewahan).

Untuk merangsang tingkat partisipasi diusulkan beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan program rehabilitasi hutan dan lahan tanpa mengaitkan dengan upah yaitu pertama pemerintah dapat melancarkan usaha

peternakan, perikanan, pertanian di kenagarian yang mandiri, dengan memberikan bantuan bibit ikan, ternak dan saprodi yang dapat dikelola oleh masyarakat secara produktif dengan adanya pendampingan oleh pihak LSM. Usaha-usaha produktif ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan sekaligus mengalihkan perhatian masyarakat untuk tidak merusak dan merambah hutan. Kedua mengembangkan usaha keluarga untuk mendapatkan tambahan pendapatan keluarga misalnya pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi melalui pelatihan dan pembinaan usaha kreatif rumah tangga.

Berdasarkan uraian hasil pengolahan data di atas dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL dipengaruhi oleh variabel motivasi, persepsi, penyuluhan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan sebesar 88,7 %, sedangkan sisanya adalah faktor-faktor lain yang tidak diteliti sebesar 11,3 %.

Faktor-faktor lain di luar variabel motivasi, persepsi, penyuluhan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan, dapat dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dari nara sumber yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, yang mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan RHL selalu berubah-ubah dalam hal aturan dan petunjuk pelaksanaan yang tergantung dengan kondisi politik di pemerintahan pusat. Artinya setiap ada perubahan atau pergantian kabinet baru atau pergantian menteri kehutanan, maka akan terjadi perubahan dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang harus disesuaikan dengan “selera” menteri yang baru. Padahal kalau dilihat perubahan tersebut dari

segi teknis dan petunjuk pelaksanaannya tidak begitu jauh beda dengan kebijakan menteri yang terdahulu. Hal ini memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan terutama adanya perubahan dalam aturan dan ketentuan tentang administrasi dan keuangan. Perubahan ini berimplikasi terhadap pelaksanaan fisik di lapangan dimana terjadinya keterlambatan pencairan dana yang mengakibatkan jadwal penanaman tidak sesuai dengan musim tanam. Penanaman yang seharusnya di laksanakan pada awal musim hujan tidak dapat terlaksana karena keterlambatan pencairan dana, dan sebaliknya dana baru cair pada musim kemarau. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dimana tidak adanya kepastian pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi upah yang akan mereka terima akan mengalami keterlambatan.

Kemudian informasi ini juga di dukung oleh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan RHL masih terdapat kebijakan yang masih bersifat *top down*. Artinya masih terdapat kebijakan dalam pengadaan bibit untuk tanaman RHL yang dikendalikan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang, dimana dalam pengadaannya, termasuk jenis bibit masih di tentukan oleh dinas. Dalam hal ini, kelompok tani tidak punya pilihan selain menerima jenis bibit yang sudah disediakan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang. Padahal dalam Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dana – Reboisasi (DAK – DR) untuk

penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dengan tegas mengatakan bahwa kegiatan RHL dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat melalui SPKS termasuk dalam hal ini pengadaan dan penentuan jenis bibit yang diminati oleh masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

Dengan demikian hal ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat ke arah yang lebih rendah, karena pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh masyarakat belum keseluruhan diberikan dalam bentuk kewenangan yang penuh atau *delegated power*. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan terutama dalam perencanaan masih bersifat *top down*, dan belum sepenuhnya dikelola secara *bottom up*. Maka wajar bila tingkat keberhasilan RHL masih rendah sebagaimana hasil evaluasi dari tim pengawas (Inspektorat).

Selanjutnya hasil wawancara dari Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang, juga mengatakan masih terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan RHL yaitu kurangnya peran tenaga pendamping. Dalam pelaksanaan kegiatan RHL selalu mengikut sertakan tenaga pendamping. Tenaga pendamping direkrut secara resmi melalui seleksi yang telah ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan RHL. Dalam pelaksanaannya, tenaga pendamping diberikan honorarium selama jangka waktu kegiatan berlangsung. Masalah baru timbul dari lembaga swadaya masyarakat lain yang tidak terlibat dalam kegiatan pendampingan, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung kepada gangguan atau intimidasi pada kelompok tani terutama kepada pengurus kelompok dengan cara mencari kelemahan-kelemahan

dalam kegiatan seperti kesalahan dalam prosedur pembagian bibit, penyelewengan keuangan, dan pengadaan sarana kegiatan, di mana sebetulnya tidak ada dan lebih bersifat intimidasi dan fitnah. Hal ini dengan akan menurunkan semangat dan gairah masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan reboisasi sehingga dengan sendirinya akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.

Dari hasil wawancara dengan aparat kelurahan/kecamatan yang mengatakan bahwa lembaga sosial seperti lembaga swadaya masyarakat lebih banyak bersifat mengintimidasi kelompok yang mengarah kepada ketidakstabilan organisasi kelompok sehingga kelompok menjadi takut untuk terlibat kegiatan RHL.

Kemudian hasil wawancara dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan RHL dalam otonomi daerah belum berjalan sesuai dengan semangat otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah seharusnya kewenangan berada di tangan pemerintah daerah terutama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dari setiap rencana kegiatan yang akan di tetapkan tetapi justru sebaliknya masih ada campur tangan pemerintah pusat terhadap kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Misalnya dalam pendanaan yang masih tergantung dari pusat sehingga pemerintah daerah, suka tidak suka harus tetap dan tunduk dengan setiap kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat.

Seperti yang terjadi pada kegiatan RHL itu sendiri, dimana semestinya dana RHL harus langsung masuk dalam dana anggaran umum tetapi harus masuk melalui dana alokasi khusus. Perbedaan pos anggaran ini akan memperpanjang

proses birokrasi yang berdampak kepada lamanya proses administari di daerah. Sehingga rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya akan banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan yang tidak selalu tepat waktu yang berujung kepada ketidak pastian kegiatan RHL yang akan dilaksanakan sehingga secara tidak langsung berpengaruh kepada animo masyarakat untuk mau terlibat dalam kegiatan RHL.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang Partisipasi Masyarakat pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Arau Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor internal (motivasi, persepsi) dan faktor eksternal (penyuluhan, lama tinggal, tingkat pendapatan) berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL. Faktor internal, yaitu variabel motivasi besar pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL dan faktor eksternal, yaitu variabel penyuluhan besar pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.
2. Besarnya pengaruh motivasi terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL dipengaruhi oleh upah yang menarik dan bantuan bibit, yang membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan RHL.

#### 5.2. Saran

1. Berdasarkan wawancara dari sejumlah nara sumber dan hasil laporan pembangunan kehutanan, dimana terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat diluar dari faktor yang diprediksi yaitu adanya kebijakan yang masih top down, tidak adanya dukungan kelembagaan sosial (LSM), faktor politik, dan pelaksanaan

otonomi daerah. Hendaknya kesemua faktor tersebut harus menjadi bahan kajian dan bahan evaluasi yang mendalam bagi Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang dalam menyusun program dan rencana di bidang kehutanan bila tidak ingin terjadi kegagalan dalam kegiatan RHL di masa-masa yang akan datang.

2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi masyarakat peserta kegiatan RHL, mengingat rata-rata masyarakat yang terlibat dalam kegiatan RHL masih berlatar belakang pendidikan rendah yang sangat lambat dalam menerima setiap perubahan yang terjadi ditengah masyarakat.
3. Perlu peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh di bidang kehutanan terutama yang berada di tingkat kecamatan dan kelurahan agar pelaksanaan kegiatan RHL mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam pemulihan dan peningkatan ekosistem hutan.
4. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di luar dari faktor internal dan eksternal karena memiliki pengaruh yang cukup besar (11,3 %).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Surya. 2008. Prinsip-Prinsip Penyuluhan dan Pembinaan Partisipasi Masyarakat. Dalam Mahasiswa dalam Pembangunan : Materi Pembekalan Kuliah Kerja Nyata. Diedit Oleh Margono Slamet. Universitas Lampung. Lampung.
- Arfides, 2005. Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis (Studi Kasus di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok). Tesis Program Pascasarjana Universitas andalas. Padang.
- Arsyad, S. 2010. Pengawetan Tanah dan Air. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Asdak, C. 2001. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gajah Mada University Press.
- BPDAS Agam Kuantan, 2011. Identifikasi Potensi Penyedia, Pengguna dan Karakter Jasa DAS Untuk Pengembangan Cost Sharing Hulu Hilir SWP DAS Arau.
- Creswell, J.W. 2002. Research Design. Qualitative & Quantitative Approaches (Pendekatan Kaulitatif & Kuantitatif). KIK Press. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2000. Dampak Pengelolaan Hutan dengan Sistem Konsesi Hutan (HP). Jakarta.
- Dewirina, 2007. Persepsi Masyarakat Terhadap Cagar Alam Rimbo Panti. Tesis Program Pascasarjana Universitas andalas. Padang.
- Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, 2012. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011. Kota Padang.
- Erwina. 2009. Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Lingkungan di Daerah Pesisir : Kasus di Kelurahan Marunda, Jakarta Utara. Tesis Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Harun Al-Rasyid, 1994, "Analisis Jalur., Program Pasca Sarjana. Universitas Padjadjaran, Lokakarya.
- Hadi, S.P. 2009. Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori, dan Metode. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hikmat, H. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press Bandung.

- Irianto, G. 2004. Menyoal Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. (<http://www.suara-pembaruan.com>)(6/4/2006).
- Irawan. SD, 2010. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. IPB Bogor.
- Juanim. 2004. Analisis Jalur Dalam Riset Pemasaran. Teknik Pengolahan Data SPSS & Lisrel. Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Pasundan Bandung.
- Karsidi, R. 2010. Paradigma Baru Penyuluhan dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pambudy dan A.K. Adhy (ed.) : Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani, Penerbit Pustaka Wirausaha Muda Bogor.
- Karmellia, R. 2009. Rehabilitasi Lahan Kritis Dengan Pendekatan Ekobisnis di Kabupaten Bogor. Tesis Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kementerian Kehutanan. 2010. Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tanaman Rehabilitasi Hutan. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2010. Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Sumber Dana DAK-DR. Buku I. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2010. Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Sumber Dana DAK-DR. Buku II. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2010. Pedoman Pembuatan Tanaman reboisasi Hutan lindung dan Hutan Produksi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sumber Dana DAK-DR. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2010. Panduan Operasional Pembangunan Desa. Ditjen PMD Depdagri. Jakarta.
- Kusworo, 2005. Partisipasi Masyarakat Dalam gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan lahan (GN-RHL) (Studi Kasus Pembuatan Hutan Rakyat Program GN-RHL di Kabupaten Solok). Tesis Program Pascasarjana Universitas andalas. Padang.
- Laffri E, 2005. Tingkat Peran serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. (Kasus Desa Rantau Langsung Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). Tesis Program Pascasarjana Universitas andalas. Padang.
- Mitchell, B. (1997). Pengelolaan Sumber Daya lingkungan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Mochtar, M. 1998. Pengantar Statistik Jilid II. Gajah Mada Press. Yogyakarta.

- Muhamad Rizal, 2005. Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus di Desa Meskom Kabupaten Bengkalis). Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas. Padang.
- Ndraha, T. 2010. Pembangunan Masyarakat. Rineka Cipta. Jakarta.
- Paembonan, S. 2006. Evaluasi Hasil Program Penyelamatan Hutan, Tanah, dan Air di Sub Das Malino, DAS Sa'dan Sulawesi Selatan. Tesis SPS-PSL, IPB, Bogor.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tanggal 3 April 2012.
- Pujo, 2009. Partisipasi Masyarakat Pada Program Kehutanan Sosial di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (Kasus di Desa Cileuya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan dan Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung). Tesis Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sattar, 2008. Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Usaha Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan di DAS Bila Wanae Sulawesi Selatan. Fakultas Pasca Sarjana. KPK. IPB – Unhas.
- Singarimbun, M dan S Effendi, 1989. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.
- Slamet, M. 2007. "Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas.", dalam Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI, A.V.S. Hubbies, P. Tjitropranoto dan W Ruwiyanto (editor). Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.
- Soesilowati, E. 2010. Pemberdayaan Masyarakat Lapisan Bawah : Kasus Kegiatan Suatu LSM di Jawa Tengah. Tesis Pasca Sarjana Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, IPB. Bogor. Tidak Diterbitkan.
- Suganda. 2008. Motivasi, Partisipasi dan Pembangunan : Tinjauan dari sisi komunikasi. Penerbit U.K. Press Jakarta.
- Suharjo, A.J. 2009. Perencanaan Program Pembangunan Masyarakat. Dalam Mahasiswa dalam Pembangunan : Materi Pembekalan Kuliah Kerja Nyata. Diedit oleh Margono Slamet. Universitas Lampung. Lampung.
- Sudarmadji, 2011. Rehabilitasi Hutan Mangrove Dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Mangrove Forest Rehabilitation with Coastal Society Empowering Approach). Jurnal Ilmu Dasar, Vol.2 No.2, 2001 : 68-71.
- Sudjana, 2002. Metoda Statistika Edisi ke 6. Penerbit Tarsito Bandung.
- Syairazi, H. 2006. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan lahan (GERHAN) di Kabupaten Tapin Provinsi

Kalimantan Selatan. Tesis Program Pasca Sarjana. Universitas Padjadjaran Bandung.

Trison, S, 2010. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan (Kasus di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi). Tesis Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Wulansari, U. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Petani pada Pembangunan Jaringan di Daerah Irigasi Tamba Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah. Bandung. Program Pasca Sarjana Unpad.



**PETA WILAYAH PENELITIAN  
SWP DAS ARAU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

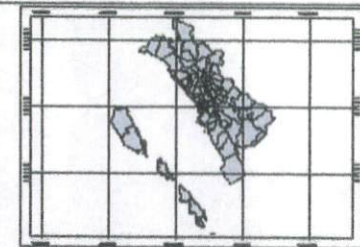


Skala 1 : 200.000



**LEGENDA :**

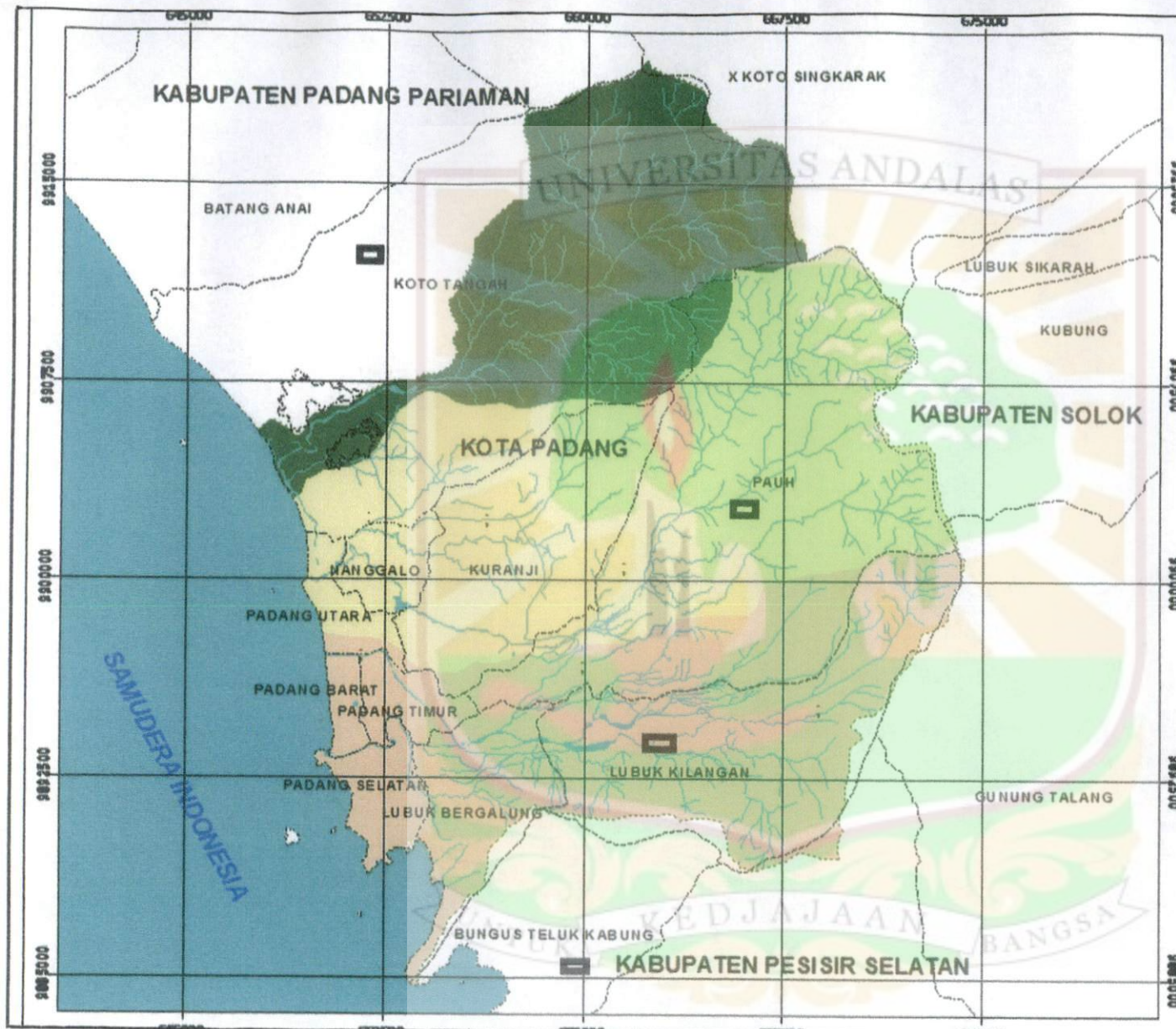
- Lokasi Penelitian
- Sungai
- Batas Kecamatan
- Batas SWP DAS ARAU
- DAS Batang Air Dingin
- Batang Kuranji
- Batang Arau



**Sumber :**

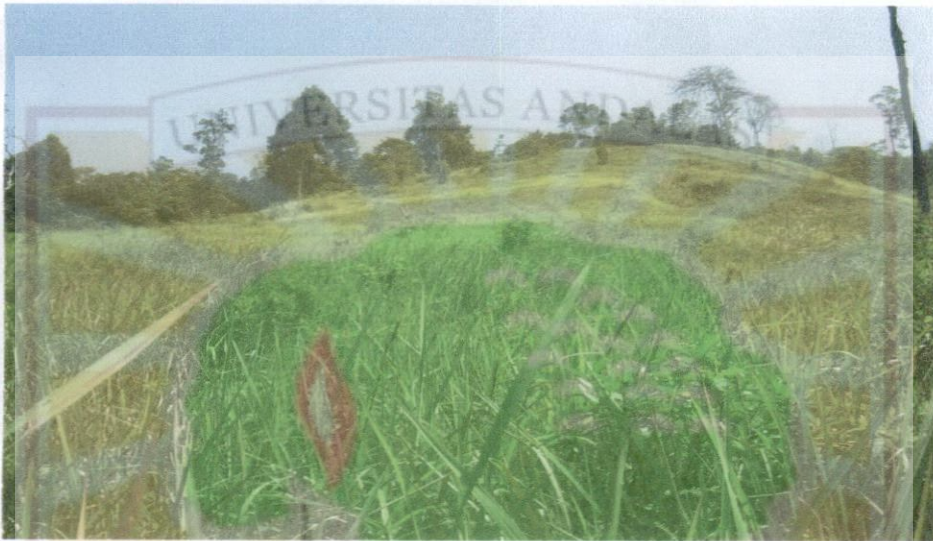
1. Peta RBI Provinsi Sumatera Barat  
Skala 1 : 25.000 Lembar 0714-G4, 0014-43 dan 0715-32
2. Interpretasi Citra SRTM
3. Peta DAS Prioritas Dephut Tahun 2003

Proyeksi : Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984  
Zone : 47 S



## Lampiran 2 : Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan RHL

Gambar 1 : Lokasi Lahan Kritis di Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang



Gambar 2 : Salah Satu Lokasi Lahan Kritis di Kec. Koto Tangah Kota Padang



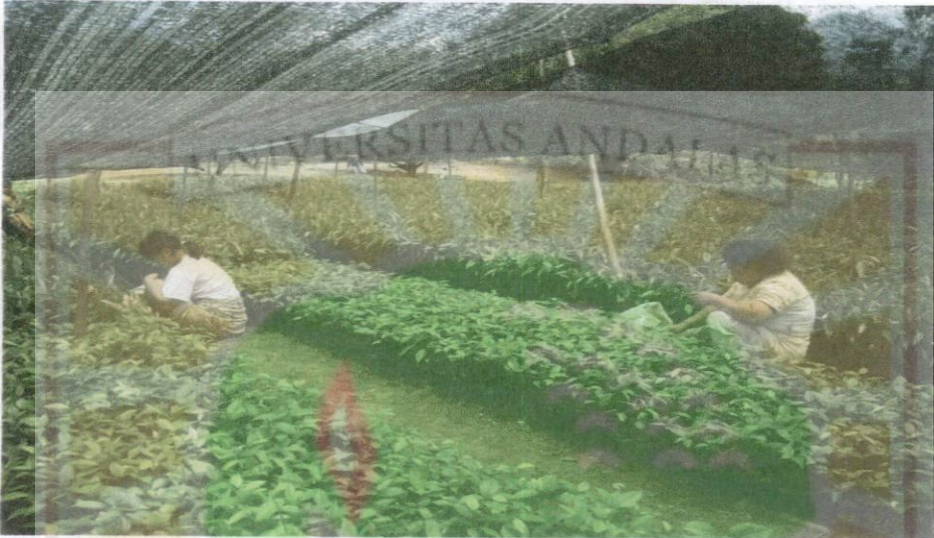
Gambar 3 : Kegiatan Pengisian Media Tanam ke dalam Polybag Oleh Kelompok Tani Kemilau Jaya.



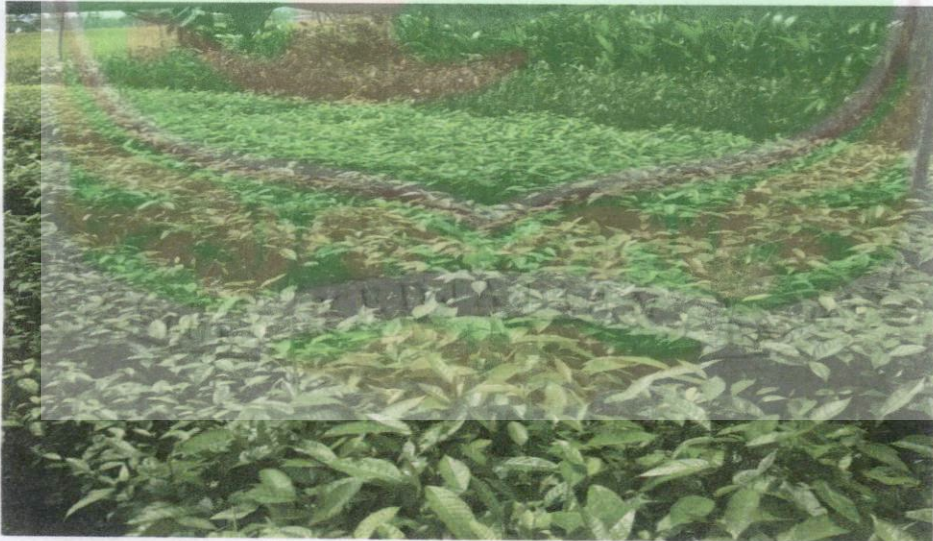
Gambar 4 : Barisan polybag berisi media tanah yang siap untuk pembenihan tanaman kehutanan dengan jenis mahoni, surian dan MPTS.



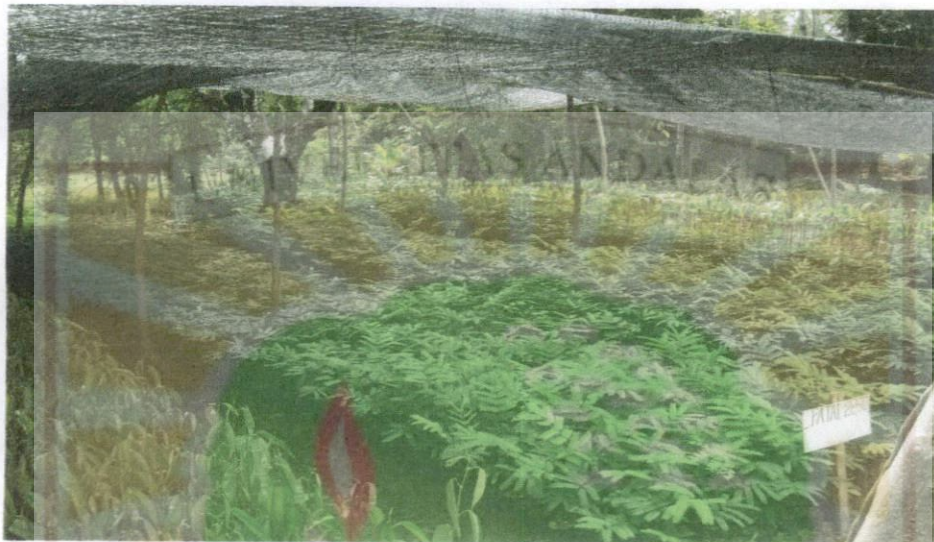
Gambar 5 : Perawatan bibit dari gulma dan rumput liar oleh Kelompok Tani Hidup Sejahtera.



Gambar 6 : Jenis bibit kehutanan (mahoni) yang sudah siap untuk ditanam dilapangan



Gambar 7 : Jenis bibit MPTS (Petai dan Durian) yang sudah siap untuk ditanam dilapangan



Gambar 8 : Jenis bibit kehutanan (Trembesi) yang sudah siap untuk ditanam dilapangan



Gambar 9 : Pelaksanaan Pembersihan lokasi penanaman oleh kelompok tani pada Program Kegiatan RHL di Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tengah



Gambar 10 : Pelaksanaan Pembersihan jalur tanaman oleh kelompok tani pada Program Kegiatan RHL di Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh.



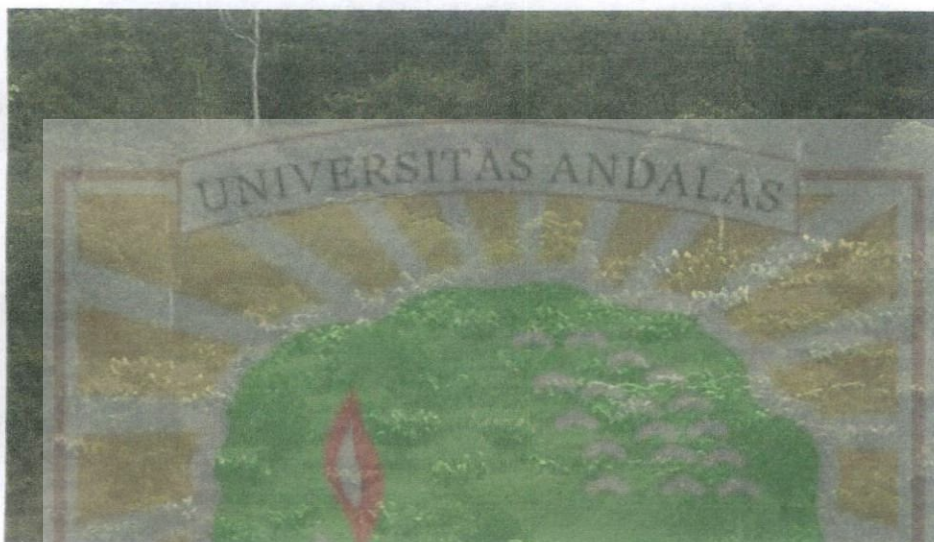
Gambar 11 : Pelaksanaan Pengangkutan bibit ke lapangan oleh Kelompok Tani Air Cindakir di Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung.



Gambar 12 : Pelaksanaan Pemberian pupuk pada tanaman oleh Kelompok Tani Air Terjun di Kel. Tarantang Kec. Lubuk Kilangan.



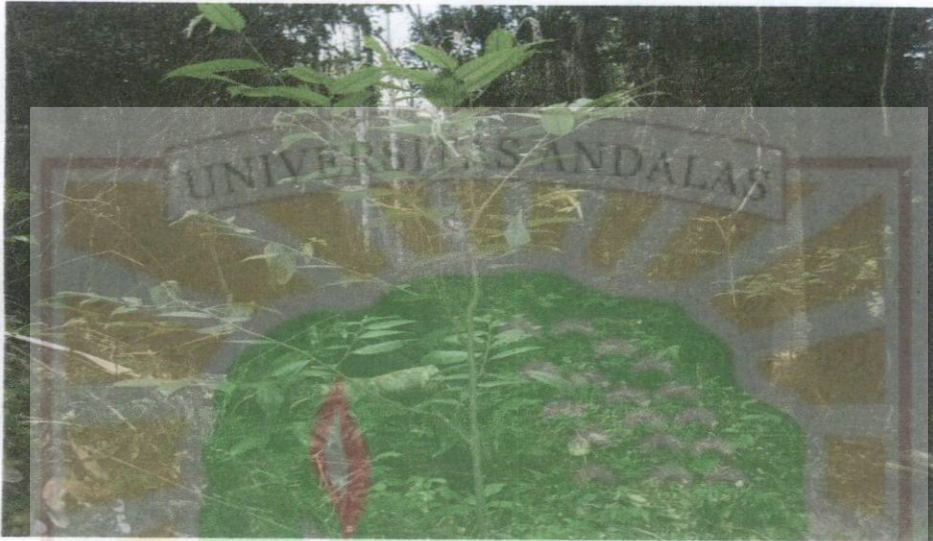
Gambar 13 : Tanaman Reboisasi Hasil Program Kegiatan RHL oleh kelompok tani di Kecamatan Koto Tengah



Gambar 14 : Tanaman Hutan Rakyat Hasil Program Kegiatan RHL oleh kelompok tani di Kecamatan Pauh



Gambar 15 : Tanaman Reboisasi Hasil Program Kegiatan RHL oleh kelompok tani di Kecamatan Bungus Teluk Kabung



Gambar 16 : Tanaman Hutan Rakyat Hasil Program Kegiatan RHL oleh kelompok tani di Kecamatan Pauh



Gambar 17 : Pengawasan terhadap Program Kegiatan RHL yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani di Kecamatan Koto Tengah



Gambar 18 : Pengawasan terhadap Program Kegiatan RHL yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani di Kecamatan Lubuk Kilangan



Gambar 19 : Pengawasan terhadap Program Kegiatan RHL yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani di Kecamatan Bungus Teluk Kabung



Gambar 20 : Pengawasan terhadap Program Kegiatan RHL yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani di Kecamatan Pauh



### Lampiran 3 : Hasil Pengolahan Data SPSS

**Variables Entered/Removed**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pendapatan, Motivasi, Lama_tinggal, Persepsi, Penyuluhan <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.923	.887	.834	.254

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Lama\_Tinggal, Persepsi, Motivasi, Penyuluhan

**Model Summary**

Model	R Square Change	F Change	Df2	Sig. F Change
1	.887	54.332	59	.002

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.243	5	2.657	48.249	.000 <sup>a</sup>
	Residual	5.687	59	.045		
	Total	18.534	64			

a. Predictor: (Constant), Pendapatan, Lama\_Tinggal, Persepsi, Motivasi, Penyuluhan

b. Dependent Variable: Partisipasi

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.043	.064		.467	.760
	Motivasi	.476	.243	.521	3.987	.003
	Persepsi	.332	.105	.256	2.678	.024
	Penyuluhan	.065	.166	.069	2.513	.016
	Lama_Tinggal	.079	.065	.073	2.298	.032
	Pendapatan	.343	.253	.277	2.219	.045

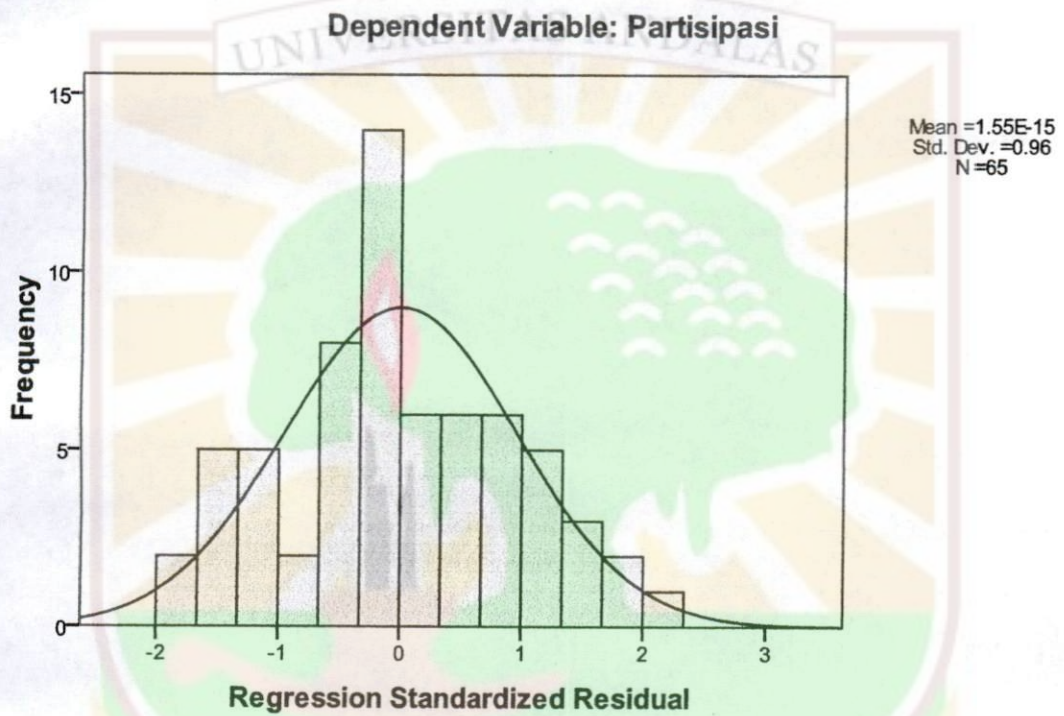
a. Dependent Variable: Partisipasi

Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	36.85	40.56	38.80	.832	65
Std. Predicted Value	-2.340	2.118	.000	1.000	65
Standard Error of Predicted Value	.584	1.089	.792	.117	65
Adjusted Predicted Value	36.84	40.70	38.79	.850	65
Residual	-4.840	5.543	.000	2.531	65
Std. Residual	-1.836	2.103	.000	.960	65
Stud. Residual	-1.885	2.201	.001	1.006	65
Deleted Residual	-5.103	6.072	.006	2.781	65
Stud. Deleted Residual	-1.928	2.277	.002	1.018	65
Mahal. Distance	2.152	9.945	4.923	1.785	65
Cook's Distance	.000	.077	.016	.020	65
Centered Leverage Value	.034	.155	.077	.028	65

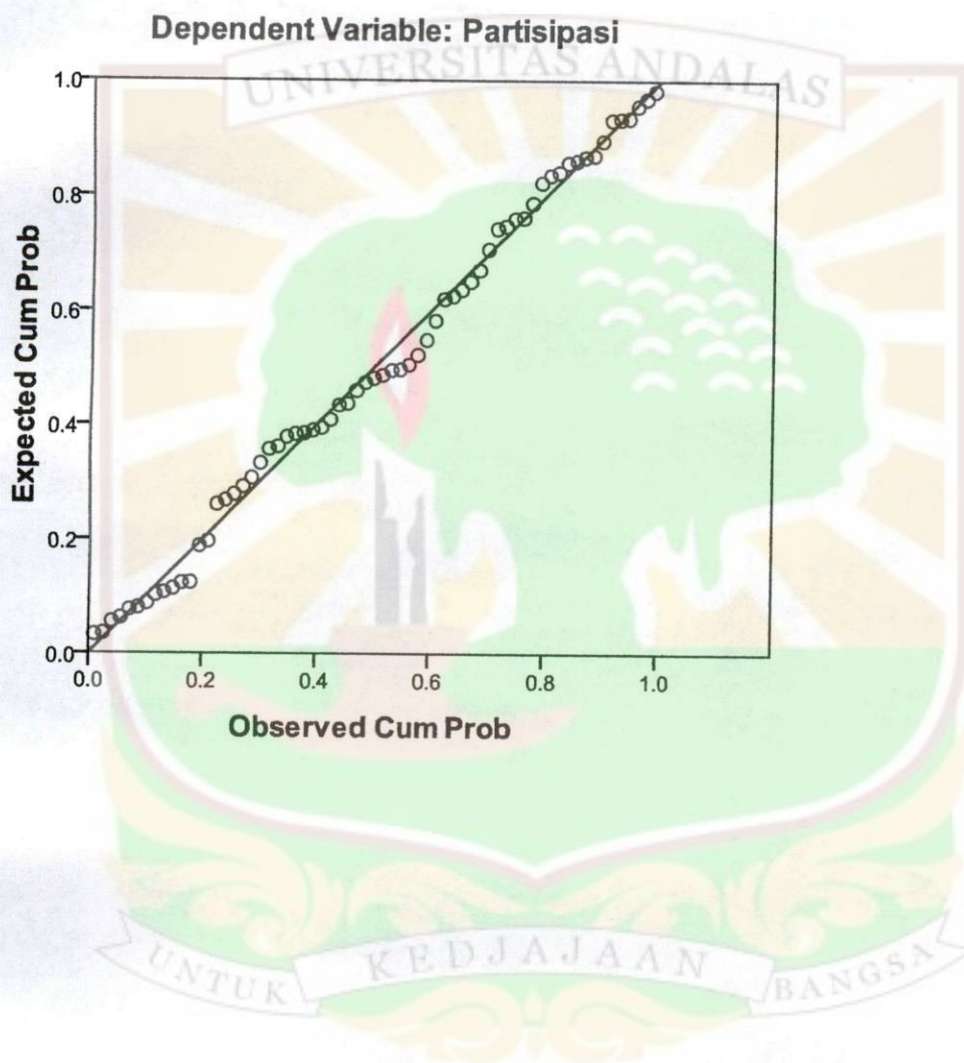
a. Dependent Variable: Partisipasi

## Histogram

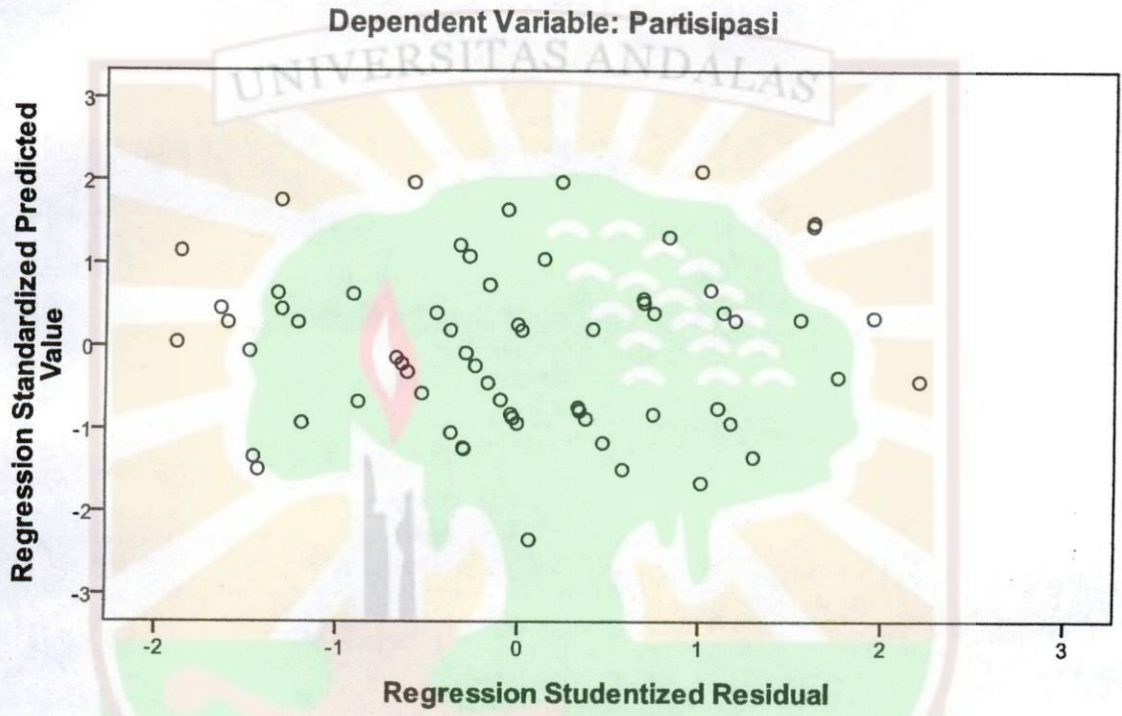


UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



### Scatterplot



Lampiran 4 : DATA RESPONDEN PESERTA KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL)

No	Responden	Jenis kelamin	Umur (Thn)	Alamat	Pendidikan	Status Dim Keltan	Luas Lahan	Status Lahan	Mata Pencapaian Pokok
1	Baharuddin	Laki-laki	30	Limau Manis Selatan	SD	Ketua			Swasta
2	Joni	Laki-laki	23	Limau Manis Selatan	SMA	Anggota			Petani
3	Huyung	Laki-laki	20	Limau Manis Selatan	SMP	Anggota			Petani
4	Ajo	Laki-laki	24	Limau Manis Selatan	SD	Anggota			Petani
5	Marwan	Laki-laki	18	Limau Manis Selatan	SD	Anggota			Petani
6	Rismet	Laki-laki	23	Limau Manis Selatan	SD	Anggota			Petani
7	Zulkifli	Laki-laki	19	Limau Manis Selatan	SD	Anggota			Petani
8	Darman	Laki-laki	30	Limau Manis Selatan	SMP	Anggota			Swasta
9	Ajurwis	Laki-laki	34	Limau Manis Selatan	SMP	Anggota			Petani
10	Mezon	Laki-laki	39	Limau Manis Selatan	SMP	Anggota			Petani
11	Syafrizal	Laki-laki	34	Limau Manis Selatan	SMP	Anggota			swasta
12	Yunus	Laki-laki	30	Limau Manis Selatan	SD	Anggota			Wiraswasta
13	Suardi	Laki-laki	47	Limau Manis Selatan	SD	Anggota			Wiraswasta
14	Darman	Laki-laki	34	Balai Gadang	SD	Bendahara			Swasta
15	Alis	Laki-laki	20	Balai Gadang	SD	Anggota			Swasta
16	Penkif	Laki-laki	36	Balai Gadang	SMP	Anggota			Swasta
17	Abdul	Laki-laki	31	Balai Gadang	SMA	Anggota			Swasta
18	Mulbendi	Laki-laki	21	Balai Gadang	STM	Anggota			Swasta
19	Jalinus	Laki-laki	54	Balai Gadang	SD	Anggota			Petani
20	Riyadi	Laki-laki	28	Balai Gadang	SMP	Anggota			Swasta
21	Petri	Laki-laki	25	Balai Gadang	SD	Anggota			Swasta
22	Nasrun	Laki-laki	29	Balai Gadang	SMP	Anggota			Swasta
23	Epison	Laki-laki	28	Balai Gadang	SMP	Anggota			Swasta
24	Jasral	Laki-laki	34	Balai Gadang	SD	Anggota			Petani
25	Mahmud	Laki-laki	44	Balai Gadang	SD	Anggota			Swasta
26	Arman	Laki-laki	21	Balai Gadang	SMA	Anggota			Swasta
27	Agustaf	Laki-laki	21	Balai Gadang	SMA	Anggota			Petani
28	Zulkifli	Laki-laki	23	Balai Gadang	SMK	Anggota			Petani
29	Mardi	Laki-laki	22	Balai Gadang	SMP	Anggota			Petani
30	Alifan	Laki-laki	21	Balai Gadang	SD	Anggota			Petani
31	Setikawan	Laki-laki	21	Balai Gadang	SMP	Anggota			Petani
32	Zainal	Laki-laki	24	Balai Gadang	STM	Anggota			Petani
33	N asir	Laki-laki	21	Balai Gadang	STM	Anggota			Petani
34	Karim	Laki-laki	35	Balai Gadang	SMA	Anggota			Swasta



No	Responden	Jenis kelamin	Umur (Thn)	Alamat	Pendidikan	Status Dim Keltan	Luas Lahan	Status Lahan	Mata Pencaharian Pokok
35	Thamrin	Laki-laki	46	Balai Gadang	SD	Anggota			Swasta
36	Syamsuddin	Laki-laki	23	Balai Gadang	SD	Anggota			Petani
37	Murdi	Laki-laki	44	Balai Gadang	SD	Anggota			Petani
38	Junaidi	Laki-laki	23	Balai Gadang	SD	Anggota			Swasta
39	Agman	Laki-laki	67	Tarantang	SMA	Anggota			Petani
40	Desmon	Laki-laki	36	Tarantang	S1	Sekretaris			Lainnya (LSM)
41	Edwar	Laki-laki	35	Tarantang	SD	Sekretaris			Petani
42	Rusman	Laki-laki	46	Tarantang	SD	Anggota			Petani
43	Eka	Laki-laki	24	Tarantang	SD	Anggota			Petani
44	Zulfatmi	Laki-laki	25	Tarantang	SMP	Bendahara			Swasta
45	Saimi	Laki-laki	30	Tarantang	SD	Sekretaris			Swasta
46	Sofman	Laki-laki	31	Tarantang	SD	Anggota			Petani
47	Basori	Laki-laki	77	Tarantang	SD	Anggota			Petani
48	Muswardi	Laki-laki	43	Tarantang	SD	Anggota			Wiraswasta
49	Ridian	Laki-laki	35	Tarantang	SMA	Bendahara			Swasta
50	Syahlan	Laki-laki	25	Tarantang	SD	Anggota			Petani
51	Rusmin	Laki-laki	44	Tarantang	SD	Anggota			Swasta
52	Sumiati	Perempuan	46	Tarantang	SD	Anggota			Petani
53	Asmayenti	Perempuan	38	Bungus Teluk Kabung	SD	Anggota			Lainnya (IRT)
54	Sadiran	Laki-laki	29	Bungus Teluk Kabung	SD	Ketua			Petani
55	Ristomon	Laki-laki	18	Bungus Teluk Kabung	SMP	Anggota			Petani
56	Mualim	Laki-laki	36	Bungus Teluk Kabung	SD	Anggota			Wiraswasta
57	Muslim	Laki-laki	21	Bungus Teluk Kabung	SD	Anggota			Swasta
58	Hendri	Laki-laki	31	Bungus Teluk Kabung	SD	Anggota			Swasta
59	Herimon	Laki-laki	25	Bungus Teluk Kabung	STM	Anggota			Swasta
60	Tasaruddin	Laki-laki	58	Bungus Teluk Kabung	SD	Anggota			Petani
61	Aliman	Laki-laki	28	Bungus Teluk Kabung	SD	Anggota			Wiraswasta
62	Gusfron	Laki-laki	38	Bungus Teluk Kabung	SD	Anggota			Swasta
63	Zainuddin	Laki-laki	47	Bungus Teluk Kabung	SD	Anggota			Swasta
64	Musuardi	Laki-laki	38	Bungus Teluk Kabung	SD	Anggota			Petani
65	Nasrul	Laki-laki	44	Bungus Teluk Kabung	SD	Anggota			Swasta



**REKAPITULASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM REHABILITASI  
HUTAN DAN LAHAN (RHL) DAS ARAU KOTA PADANG**

No.	Responden	Partisipasi (Y)	Motivasi (X1)	Persepsi (X2)	Penyuluhan (X3)	Lama Tinggal (X4)	Tingkat Pendapatan (X5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baharuddin	41	1	1	3	30	750.000
2	Joni	39	1	1	2	21	500.000
3	Huyung	41	1	0	2	15	750.000
4	Ajo	41	1	1	2	20	800.000
5	Marwan	44	1	0	3	10	500.000
6	Rismet	41	1	1	2	20	500.000
7	Zulkifli	40	1	1	2	10	750.000
8	Darman	43	1	1	3	30	750.000
9	Ajurwis	42	1	1	1	30	750.000
10	Mezon	43	1	1	3	30	800.000
11	Syafrizal	41	1	1	1	30	500.000
12	Yunus	42	1	1	3	30	500.000
13	Suardi	37	1	1	2	30	500.000
14	Darman	38	1	1	0	30	500.000
15	Alis	37	1	1	3	15	500.000
16	Penkif	36	1	1	3	30	500.000
17	Abdul	35	1	1	3	30	1.000.000
18	Mulbendi	39	1	1	2	20	750.000
19	Jalinus	37	1	1	1	30	750.000
20	Riyadi	38	1	1	3	22	750.000
21	Petri	41	1	1	3	20	1.000.000
22	Nasrun	38	1	1	3	24	500.000
23	Epison	39	1	1	1	23	500.000
24	Jasral	37	1	1	1	30	500.000
25	Mahmud	38	1	1	3	30	500.000
26	Arman	38	1	1	3	20	500.000
27	Agustaf	39	1	1	2	20	500.000
28	Zulkifli	38	1	1	2	20	800.000
29	Mardi	38	1	1	2	20	800.000
30	Alifan	36	1	0	2	20	1.000.000
31	Setikawan	36	1	0	2	20	1.500.000
32	Zainal	38	1	0	3	20	500.000
33	N asir	37	1	1	2	20	500.000
34	Karim	37	1	0	2	30	500.000
35	Thamrin	37	1	0	1	30	500.000

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Syamsuddin	37	1	1	2	25	500.000
37	Murdi	37	1	1	3	30	800.000
38	Junaidi	37	1	1	2	20	800.000
39	Agman	37	1	1	3	30	1.000.000
40	Desmon	36	1	1	2	30	1.500.000
41	Edwar	37	1	1	3	30	500.000
42	Rusman	36	1	1	2	30	1.000.000
43	Eka	39	1	1	2	20	1.500.000
44	Zulfatmi	38	1	1	3	20	800.000
45	Salmi	41	1	1	1	30	1.500.000
46	Sofman	42	1	1	3	30	500.000
47	Basori	40	1	1	1	30	1.500.000
48	Muswardi	39	1	0	3	30	1.000.000
49	Ridian	40	1	0	2	30	1.750.000
50	Syahlan	38	1	1	0	20	500.000
51	Rusmin	40	1	1	3	30	1.750.000
52	Sumiati	40	1	1	3	30	1.000.000
53	Asmayenti	39	1	1	3	30	1.800.000
54	Sadiran	39	1	1	2	25	500.000
55	Ristomon	34	1	1	1	10	1.850.000
56	Mualim	38	1	1	3	30	800.000
57	Muslim	36	1	1	3	20	1.800.000
58	Hendri	38	1	1	3	30	800.000
59	Herimon	35	1	1	1	22	1.750.000
60	Tasaruddin	39	1	1	1	30	500.000
61	Aliman	39	1	1	3	24	500.000
62	Gusfron	38	1	0	3	30	1.000.000
63	Zainuddin	37	1	1	2	30	1.750.000
64	Musuardi	37	1	1	2	30	1.000.000
65	Nasrul	35	1	1	2	30	1.250.000



No	Responden	Perencanaan						Pelaksanaan												Pengawasan			SKOR					
		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14	Item 15	Item 16	Item 17	Item 18	Item 19	Item 20	Item 21		Item 22	Item 23	Item 24	Y	
1	Baharuddin	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	41	
2	Joni	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	39	
3	Huyung	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	41	
4	Ajo	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	41	
5	Marwan	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	41	
6	Rismet	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	44	
7	Zulkifli	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	41	
8	Darman	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	40	
9	Ajurwis	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	42	
10	Mezon	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	43	
11	Syafrizal	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	41	
12	Yunus	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	41	
13	Suardi	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	42	
14	Darman	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	37	
15	Alis	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	38	
16	Penkif	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	37	
17	Abdul	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	35	
18	Mulbendi	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	39	
19	Jalinus	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	37	
20	Riyadi	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	38	
21	Petri	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	41	
22	Nasrun	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	38	
23	Epison	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	38	
24	Jasral	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	39	
25	Mahmud	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	37	
26	Arman	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	38	
27	Agustaf	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	39	
28	Zulkifli	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	38	
29	Mardi	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	38	
30	Alifan	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	38	
31	Setikawan	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	36	
32	Zainal	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	36	
33	N asir	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	38	
34	Karim	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	37	
35	Thamrin	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	37	
36	Syamsuddin	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	37	
37	Murdi	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	37	
38	Junaidi	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	37	
39	Agman	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	37	
40	Desmon	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	37	
41	Edwar	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	36	
42	Rusman	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	36

No	Responden	Pelaksanaan														Pengawasan				SKOR					
		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14	Item 15	Item 16	Item 17	Item 18		Item 19	Item 20	Item 21	Item 22	Item 23
43	Eka	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	Y
44	Zulfatmi	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	39
45	Salmi	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	38
46	Sofman	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	41
47	Basori	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	42
48	Muswardi	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	40
49	Ridian	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	39
50	Syahlan	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	40
51	Rusmin	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	38
52	Sumiati	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	40
53	Asmayenti	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	40
54	Sadran	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	39
55	Ristomon	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	39
56	Mualim	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	34
57	Muslim	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	38
58	Hendri	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	36
59	Herimon	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	38
60	Tasaruddin	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	35
61	Aliman	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	39
62	Gusfron	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	39
63	Zainuddin	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	38
64	Musuardi	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	37
65	Nasrul	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	37



**KUESIONER KELOMPOK TANI PESERTA KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA PENELITIAN  
" PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) DAS ARAU KOTA PADANG"**

## A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Umur (Tahun) : .....
4. Agama : .....
5. Pendidikan : .....
6. Mata Pencaharian Pokok : .....
7. Lama Tinggal : .....
8. Pendapatan/Bulan : .....
9. Kehadiran dalam penyuluhan/tahun : .....
9. Kelompok tani : .....
10. Luas Lahan (Ha) : .....
11. Status Lahan : .....
12. Status Dalam Kelompok Tani : .....
13. Alamat : .....

No.	Partisipasi		Motivasi		Persepsi	
	Pertanyaan	Jawaban	Pertanyaan	Jawaban	Pernyataan	Jawaban
1	2	3	4	3	5	6
<b>A. Tahap Perencanaan :</b>						
1.	Apakah Bapak/Ibu hadir dalam penentuan survey lokasi lahan kritis untuk kegiatan RHL	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu hadir dalam penentuan survey lokasi  Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak hadir dalam penentuan survey lokasi	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Kegiatan penentuan survey lokasi berdasarkan kepada kriteria lahan kritis yang telah ditetapkan	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
2.	Apakah Bapak/Ibu hadir dalam pengukuran lokasi kegiatan RHL	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu hadir dalam pengukuran lokasi	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan	Kegiatan pengukuran lokasi berguna dalam penentuan jumlah bibit yang ditanam	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju

1	2	3	4	3	5	6
			<p>Jika Tidak :</p> <p>Mengapa Bapak/Ibu tidak hadir dalam pengukuran lokasi</p>	<p>1. Tidak mengerti</p> <p>2. Upah tidak menarik</p> <p>3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan</p>		
3.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan teknis RHL	<p>1. Tidak</p> <p>2. Ya</p>	<p>Jika Ya :</p> <p>Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam penyusunan rancangan teknis RHL</p> <p>Jika Tidak :</p> <p>Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam penyusunan rancangan teknis RHL</p>	<p>1. Karena ikut teman</p> <p>2. Ada upah menarik</p> <p>3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan</p> <p>1. Tidak mengerti</p> <p>2. Upah tidak menarik</p> <p>3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan</p>	Penyusunan rancangan teknis tidak perlu mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan	<p>1. Sangat Tidak Setuju</p> <p>2. Tidak Setuju</p> <p>3. Ragu-Ragu</p> <p>4. Setuju</p> <p>5. Sangat Setuju</p>
4.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rincian rencana biaya	<p>1. Tidak</p> <p>2. Ya</p>	<p>Jika Ya :</p> <p>Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam penyusunan rancangan teknis RHL</p> <p>Jika Tidak :</p> <p>Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam penyusunan rancangan teknis RHL</p>	<p>1. Karena ikut teman</p> <p>2. Ada upah menarik</p> <p>3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan</p> <p>1. Tidak mengerti</p> <p>2. Upah tidak menarik</p> <p>3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan</p>	Rincian rencana biaya perlu disusun agar kebutuhan bahan dan upah lebih jelas dan diketahui oleh masyarakat	<p>1. Sangat Tidak Setuju</p> <p>2. Tidak Setuju</p> <p>3. Ragu-Ragu</p> <p>4. Setuju</p> <p>5. Sangat Setuju</p>
5.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rencana waktu untuk kegiatan RHL	<p>1. Tidak</p> <p>2. Ya</p>	<p>Jika Ya :</p> <p>Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam penyusunan rencana waktu untuk kegiatan RHL</p> <p>Jika Tidak :</p> <p>Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam penyusunan rencana waktu untuk kegiatan RHL</p>	<p>1. Karena ikut teman</p> <p>2. Ada upah menarik</p> <p>3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan</p> <p>1. Tidak mengerti</p> <p>2. Upah tidak menarik</p> <p>3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan</p>	Rencana waktu tidak banyak digunakan dalam kegiatan RHL karena iklim selalu berubah ubah	<p>1. Sangat Tidak Setuju</p> <p>2. Tidak Setuju</p> <p>3. Ragu-Ragu</p> <p>4. Setuju</p> <p>5. Sangat Setuju</p>
6.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pembuatan peta lokasi sebagai pedoman dalam kegiatan RHL	<p>1. Tidak</p> <p>2. Ya</p>	<p>Jika ya :</p> <p>Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pembuatan</p>	<p>1. Karena ikut teman</p> <p>2. Ada upah menarik</p> <p>3. Ingin terlibat utk</p>	Pembuatan peta sudah dibuat dengan skala yang benar	<p>1. Sangat Tidak Setuju</p> <p>2. Tidak Setuju</p> <p>3. Ragu-Ragu</p>

1	2	3	4	3	5	6
			peta lokasi penanaman  Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam pembuatan peta lokasi penanaman	menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan		4. Setuju 5. Sangat Setuju
	<b>B. Tahap Pelaksanaan :</b> 7. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pemancangan tanda batas areal kegiatan RHL	1. Tidak 2. Ya	Jika ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pemancangan tanda batas arela kegiatan RHL  Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam pemancangan tanda batas arela kegiatan RHL	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Pemancangan tanda batas areal sangat berguna dalam kegiatan penanaman	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
	8. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pengukuran ulang lapangan sebelum kegiatan dimulai	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pengukuran ulang lapangan sebelum kegiatan dimulai  Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam pengukuran ulang lapangan sebelum kegiatan dimulai	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Pengukuran ulang lapangan tidak perlu lagi karena sudah diukur pada survey pendahuluan	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
	9. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pembersihan lapangan mulai dari penebasan semak belukar, tanaman liar, dan pembuangan tunggak kayu	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam penebasan semak belukar, tanaman liar dan pembuangan tunggak kayu  Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam penebasan semak belukar, tanaman liar dan pembuangan tunggak kayu	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Kegiatan pembersihan lapangan dikerjakan lebih awal sebelum bibit di tanam	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju

1	2	3	4	3	5	6
10.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pembuatan arah larikan sebelum bibit di tanam	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pembuatan arah larikan sebelum bibit ditanam Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam pembuatan arah larikan sebelum bibit ditanam	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Arah larikan bermanfaat dalam mengatur posisi tanaman agar lebih teratur dan rapi	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
11.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pemancangan ajir	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pemancangan ajir Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam pemancangan ajir	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Ajir sebaiknya tidak diperlukan karena bibit dapat tumbuh dengan baik dan sehat	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
12.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pembuatan lubang sebelum bibit di bawa kelapangan	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pembuatan lubang sebelum bibit dibawa kelapangan Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam pembuatan lubang sebelum bibit dibawa kelapangan	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Lubang sangat penting dibuat dan harus sesuai dengan ukuran dan jenis tanaman yang akan ditanam	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
13.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pembuatan piringan tanaman	1. Tidak 2. Ya	Jika ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pembuatan piringan tanaman Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam pembuatan piringan tanaman	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Piringan tanaman bermanfaat untuk mengatasi masalah gulma dan hama penyakit	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju

1	2	3	4	3	5	6
14.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pembuatan gubuk kerja	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pembuatan gubuk kerja Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam pembuatan gubuk kerja	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Pembuatan gubuk kerja sebaiknya dibuat secara permanen agar tahan lama	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
15.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pembuatan papan pengenal kegiatan	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pembuatan papan pengenal kegiatan Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam pembuatan papan pengenal kegiatan	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Papan pengenal berguna sebagai penunjuk kegiatan yang telah dilaksanakan	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
16.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penentuan tempat penyediaan bibit sebagai tempat penampungan bibit	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam penentuan tempat Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam penentuan tempat	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Perlu penentuan tempat penyediaan bibit sebagai tempat penampungan	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
17.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyiapan bahan/peralatan dan perlengkapan kerja	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam penyiapan bahan/peralatan dan perlengkapan kerja Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam penyiapan bahan/peralatan dan perlengkapan kerja	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Penyiapan bahan/perengkapan kerja kurang berguna bagi kelompok tani dalam bekerja	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju

1	2	3	4	3	5	6
18.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pendistribusian bibit mulai dari tempat penampungan sementara sampai bibit siap untuk ditanam	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pendistribusian bibit mulai dari tempat penampungan sementara ke tempat bibit siap di tanam Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam pendistribusian bibit mulai dari tempat penampungan sementara ke tempat bibit siap di tanam	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Pendistribusian bibit harus sesuai dengan jumlah bibit dengan luas areal yang akan ditanam	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
19.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penanaman bibit yang merupakan kegiatan pokok dalam RHL	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam penanaman bibit yang merupakan kegiatan pokok dalam RHL Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam penanaman bibit yang merupakan kegiatan pokok dalam RHL	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Penanaman bibit harus memperhatikan kondisi cuaca karena penanaman merupakan kegiatan pokok dalam RHL	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
20.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pemupukan untuk seluruh bibit yang ada dalam areal penanaman	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pemupukan utk seluruh bibit yang ada dalam areal penanaman Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam pemupukan utk seluruh bibit yang ada dalam areal penanaman	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Komposisi pupuk harus benar dan tepat agar tanaman tidak kekurangan unsur hara	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
21.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan penyulaman terhadap bibit yang mati	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam kegiatan penyulaman terhadap bibit yang mati Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam kegiatan	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik	Penyulaman perlu bagi bibit yang mati	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju

1	2	3	4	3	5	6
			penyulaman terhadap bibit yang mati	3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan		
<b>C. Tahap Monitoring dan Evaluasi</b>						
22.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penilaian kemajuan atau hasil kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dengan tim money dari instansi terkait.	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam penilaian bersama tim money Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam penilaian bersama tim money	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Penilaian kemajuan kegiatan sangat berguna sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan RHL	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
23.	Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pembuatan laporan hasil/kemajuan kegiatan RHL secara periodik (mingguan, bulanan) dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pembuatan laporan secara periodik Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam pembuatan laporan secara periodik	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Pembuatan laporan secara periodik sangat membantu dalam menilai tahapan kegiatan yang telah dikerjakan	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju
24.	Apakah Bapak/Ibu perlu terlibat dalam menyampaikan laporan kegiatan RHL dari kelompok tani ke aparat kehutanan.	1. Tidak 2. Ya	Jika Ya : Mengapa Bapak/Ibu mau terlibat dalam penyampaian laporan dari kelompok tani ke aparat kehutanan Jika Tidak : Mengapa Bapak/Ibu tidak mau terlibat dalam penyampaian laporan dari kelompok tani ke aparat kehutanan	1. Karena ikut teman 2. Ada upah menarik 3. Ingin terlibat utk menjaga lingkungan  1. Tidak mengerti 2. Upah tidak menarik 3. Tidak ingin terlibat dlm menjaga lingkungan	Laporan yang dibuat oleh kelompok tani cukup satu bulan sekali	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Ragu-Ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju